



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP ANGKA  
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2010-2016**

**SKRIPSI**

Oleh

**Shofiyah  
NIM 140210301082**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP ANGKA  
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2010-2016**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi (S-1)  
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh  
**Shofiyah**  
**NIM 140210301082**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi, serta yang terkandung di dalamnya. *Alhamdulillah*, karena dengan kuasa-Nya, saya dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Skripsi ini, saya persembahkan untuk:

- 1) Ayahanda Sudarmo dan Ibunda Rustija yang dengan ikhlas mendidik, memberikandukungan yang tak henti-hentinya, serta doa tulus yang selalu mereka panjatkan demi keberhasilan saya hingga saat ini;
- 2) Bapak dan Ibu gurusemasa sekolah dasar sampai menengah atas, serta dosen saya yang telah memberikan arahan dalam proses belajar saya; dan
- 3) Almamater tercinta, Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember.

**MOTTO**

... “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singgasana) yang Agung.”(terjemahan Surah *At-Taubah* ayat 129)<sup>\*)</sup>

*The identity of an individual is essentially a function of her choices, rather than the discovery of an immutable attribute.\*\*)*

Bolehlah kita ini miskin, bodoh, jelek, pesek, tapi janganlah kita pernah berhenti sekolah.\*\*\*)

---

<sup>\*)</sup>Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2018), hl. 207.

<sup>\*\*)</sup>Amartya Sen, *Pembangunan Manusia*, diakses dari <http://ipm.bps.go.id/> pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 06.27 WIB.

<sup>\*\*\*)</sup>Andrea Hirata, *Ayah*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015), hlm. 47.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Shofiyah

NIM : 140210301082

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juli 2018

Yang menyatakan,

Shofiyah  
NIM 140210301082

**PERSETUJUAN**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2016**

diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program  
Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Jember

Oleh

Nama Mahasiswa : Shofiyah  
NIM : 140210301082  
Jurusan : Pendidikan IPS  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Angkatan Tahun : 2014  
Daerah Asal : Probolinggo  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Januari 1997

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Sukidin, M.Pd.  
NIP. 19660323 199301 1 001

Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19870924 201504 1 001

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Agustus 2018

Tempat : Ruang 44C 104 Gedung I FKIP, Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Sukidin, M.Pd.  
NIP. 19660323 199301 1 001

Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19870924 201504 1 001

Anggota I

Anggota II

Hety Mustika Ani, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19800827 200604 2 001

Mukhamad Zulianto, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19880721 201504 1 001

Mengesahkan,  
p.l.h Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Jember

Prof. Dr. Suratno, M.Si.  
NIP. 19670625 199203 1 003

## RINGKASAN

**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016:** Shofiyah, 140210301082; 2018; 87 halaman; Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017:1). Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan-perubahan dalam struktur produksi, dan sektor perekonomian. Secara makro, pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk wilayah. PDRB meringkas perolehan nilai tambah dari suatu produksi yang dilakukan oleh suatu daerah, dari segi barang ataupun jasa pada waktu tertentu. PDRB berdasarkan harga konstan merupakan perhitungan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan perbandingan tahun dasar.

Pembangunan bukan saja diukur dari seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tertentu, melainkan kontribusi sumber daya manusia di dalamnya. Pembangunan dilaksanakan oleh manusia dan tujuan dari pembangunan ialah manusia itu sendiri. Konsep pembangunan yang mengukur kualitas manusia ialah indeks pembangunan manusia dengan mencakup tiga indeks, yakni: pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran (BPS Pusat, 2015). *United Nation Development Programme* (UNDP) mencatat IPM Indonesia pada tahun 2016 yaitu pada urutan ke 113 dari 188 negara (Zabidi, 2016). Provinsi Jawa Timur memiliki IPM yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan berada pada kategori pembangunan manusia sedang, yaitu berada di antara persentase 0,50-0,799 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2018).

Kedua aspek pembangunan tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan. merupakan indikasi dari ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dari segi ekonomi. Semakin banyak jumlah penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap penduduk total. Kemiskinan menjadi permasalahan setiap daerah dengan kadarnya masing-masing, termasuk Jawa Timur. Jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2016 yaitu 39.075.152 jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017).

Analisis untuk mengetahui angka kemiskinan ini diperlukan analisis yang kompleks, yaitu perpaduan data *time series* dari tahun 2010-2016 dan data *cross section* yaitu data dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB dan IPM terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan estimasi model *Fixed Effect Model* (FEM) dan bantuan program aplikasi *EViews 9.0*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar  $0.000000 < 0,05$ .  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Variabel PDRB dan IPM berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 sebesar 97,4797% sisanya sebesar 2,5203% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Secara parsial, variabel PDRB berpengaruh sebesar -0,251899 artinya apabila ada peningkatan PDRB sebesar 1 miliar, maka angka kemiskinan akan turun sebesar 0,251899% terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Variabel IPM berpengaruh sebesar -1,868236 artinya apabila ada peningkatan IPM sebesar 1 satuan, maka angka kemiskinan akan turun sebesar 1,868236% terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.

## PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016” guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, dan Dra. Sri Wahyuni, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
- 2) Dr. Sukidin, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I dan Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini, serta Hety Mustika Ani, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Penguji I dan Mukhamad Zulianto, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini;
- 3) Drs. Bambang Suyadi, M.Si., yang telah mengayomi penulis untuk mencari dan menemukan penelitian yang lebih aplikatif dan dibutuhkan oleh pembaca;
- 4) Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu selama penulis melakukan studi;

- 5) Teman-teman Pendidikan Ekonomi angkatan 2014, Jurnal Pendidikan Ekonomi, dan KKMT SMPN 4 Jember yang telah memberikan jejak perjalanan indah dalam beberapa tahun ini;
- 6) Teman-teman terbaik yang Allah hadirkan untuk penulis, yaitu: Novita, Umi, Anik, Suci, Wulan, Riki, Yuni, Umu, Ana, Rusdiah, Novelia, Indah, dan Annisa. Terima kasih telah merekam perjalanan penulis serta memberikan keteguhan untuk berani melangkah;
- 7) Sahabat penulis di komunitas Ayo Menulis, terutama Kak Titin Widyawati (Darah Mimpi). Terima kasih untuk ilmu kepenulisannya, karena motivasi dan kegigihan kalian mengajari penulis agar dapat merangkai kata dalam dunia fiksi, kemudian penulis aplikasikan untuk skripsi ini; dan
- 8) Seluruh pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Jember, 30 Juli 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	13
2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	17
2.2.3 Angka Kemiskinan .....	24
2.3 Hubungan antar Variabel .....	32
2.3.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Angka Kemiskinan .....	32

2.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan .....	33
2.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan.....	35
2.4 Kerangka Berpikir Penelitian.....	36
2.5 Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	36
3.3 Tempat Penelitian .....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.7 Estimasi Regresi dengan Data Panel.....	44
3.7.1 <i>Pooled Least Square (PLS)</i> .....	44
3.7.2 <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> .....	45
3.7.3 <i>Random Effect Model (REM)</i> .....	45
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.8.1 Uji Multikolinieritas .....	48
3.8.2 Uji Heteroskedastisitas .....	48
3.9 Uji Signifikansi Statistik .....	49
3.9.1 Uji Signifikansi Parameter Parsial (t).....	49
3.9.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (F) .....	50
3.9.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	50
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	52
4.1.1 Data Pendukung .....	52
4.1.2 Hasil Pengujian.....	60
4.2 Pembahasan.....	66
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>79</b>

5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

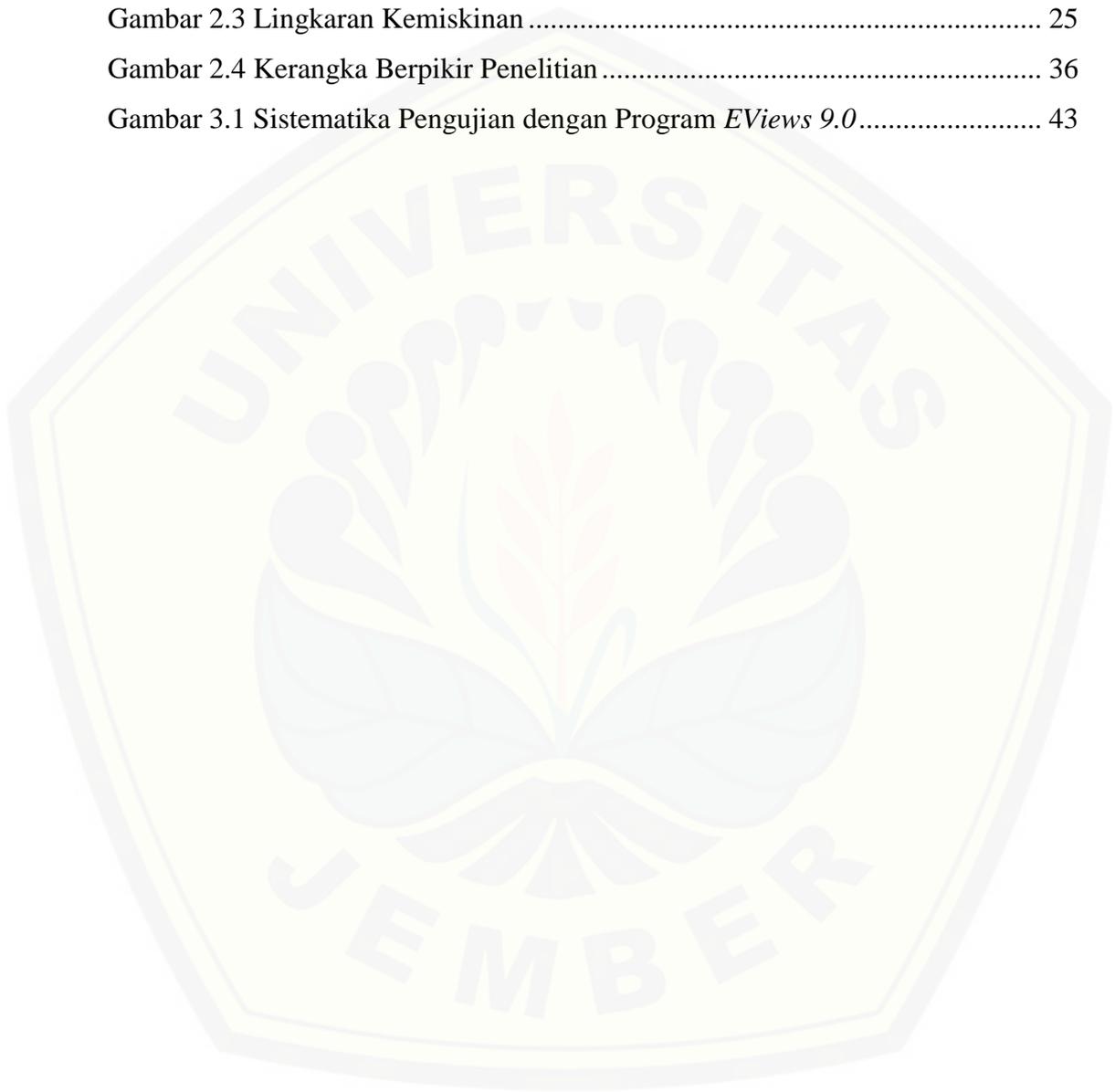


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB, IPM, dan Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator IPM.....	23
Tabel 2.3 Pengkategorian IPM.....	23
Tabel 2.4 Statistik Rumah Tangga Berdasarkan Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan.....	26
Tabel 2.5 Statistik Rumah Tangga Berdasarkan Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Sandang.....	27
Tabel 2.6 Statistik Rumah Tangga Berdasarkan Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Papan.....	28
Tabel 2.7 Garis Kemiskinan Provinsi Berdasarkan Jumlah Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	32
Tabel 4.1 Hasil Uji <i>Chow</i> .....	60
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	61
Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	61
Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	62
Tabel 4. 6 Hasil Uji t.....	63
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	65
Tabel 4.8 Determinasi R <sup>2</sup> .....	65

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Indikator IPM .....	19
Gambar 2.2 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita.....	21
Gambar 2.3 Lingkaran Kemiskinan .....	25
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian .....	36
Gambar 3.1 Sistematika Pengujian dengan Program <i>EViews 9.0</i> .....	43



**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Jiwa).....	54
Grafik 4.2 PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	56
Grafik 4. 3 Nilai IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	57
Grafik 4.4 Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	59
Grafik 4.5 Tiga Sektor Lapangan Usaha Terbesar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	67
Grafik 4.6 Kabupaten/Kota dengan Nilai PDRB Tertinggi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Miliar Rupiah).....	69
Grafik 4.7 Kabupaten/Kota dengan Nilai PDRB Terendah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Miliar Rupiah).....	71

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Matrik Penelitian .....	89
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	91
Lampiran 3 PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.....	92
Lampiran 4 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	94
Lampiran 5 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016.....	95
Lampiran 6 AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 ...	97
Lampiran 7 AHS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016....	98
Lampiran 8 RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016...	100
Lampiran 9 Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Ribuan Rupiah).....	102
Lampiran 10 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	104
Lampiran 11 Garis Kemiskinan per Kapita per Bulan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 .....	106
Lampiran 12 Tabel Logaritma Angka Kemiskinan, PDRB, dan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016.....	108
Lampiran 13 Hasil Uji <i>Chow</i> .....	115
Lampiran 14 Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	116
Lampiran 15 Hasil Uji Multikolinieritas.....	117
Lampiran 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	117
Lampiran 17 Hasil Regresi dengan <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> .....	118
Lampiran 18 Transkrip Wawancara .....	120
Lampiran 19 Tabel Nilai Distribusi <i>t</i> .....	126
Lampiran 20 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 1 .....	127
Lampiran 21 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 2 .....	128
Lampiran 22 Surat Izin Penelitian.....	129
Lampiran 23 Surat Keterangan Penelitian .....	130

Lampiran 24 Daftar Riwayat Hidup..... 131



## BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar rancangan penelitian, rumusan masalah sebagai tolak ukur penelitian, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, dan manfaat penelitian bagi berbagai pihak.

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017:1). Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan-perubahan dalam struktur produksi, dan sektor perekonomian. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil, jika angka kemiskinan dan jumlah pengangguran mengalami penurunan. Pembangunan ekonomi perlu didukung oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan yang memadai. Sumber daya alam dan modal dibutuhkan sebagai *input* produksi. Sumber daya manusia digunakan untuk mengolah *input* dan menghasilkan *output* produksi dengan kemampuan berwirausaha masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah/daerah dari segi ekonomi pada waktu tertentu, salah satunya dengan pendekatan produksi. PDRB yang tinggi dan berkelanjutan berarti terjadi peningkatan terhadap pembangunan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan jumlah masyarakat miskin berkurang. PDRB meringkas perolehan nilai tambah dari suatu produksi yang dilakukan oleh suatu daerah, dari segi barang ataupun jasa pada waktu tertentu. Perhitungan PDRB melalui dua cara, yaitu dengan harga berlaku dan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung pada tahun tertentu. PDRB berdasarkan harga konstan merupakan perhitungan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan perbandingan tahun dasar.

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB, IPM, dan Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

No	Tahun	Jumlah PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	IPM	Angka Kemiskinan (%)
1	2010	990.648,80	65,36	14,87
2	2011	1.054.401,80	66,06	13,80
3	2012	1.124.464,60	66,74	13,08
4	2013	1.192.789,80	67,55	12,73
5	2014	1.262.684,50	68,14	12,28
6	2015	1.331.395	68,95	12,34
7	2016	1.405.236,10	69,74	12,05

Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terjadi disebabkan 17 sektor lapangan usaha yang setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun tiga sektor dengan nilai kontribusi tertinggi, yaitu: (1) sektor industri pengolahan, (2) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan (3) pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur (2018) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menyumbang PDRB Rp 411.028,39 miliar pada tahun 2016, yang notabene sektor tersebut berkembang di daerah perkotaan, sehingga kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah daripada perdesaan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur (2017) menunjukkan sektor terbesar kedua yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, menyumbang Rp 257.126,66 miliar terhadap PDRB pada tahun 2016. Sektor tersebut tinggi disebabkan oleh konsumsi masyarakat Provinsi Jawa Timur terhadap pembelian mobil dan motor tinggi. Pembelian tersebut didukung oleh pemberian kredit yang disediakan guna memudahkan pembelian masyarakat, sehingga sektor perdagangan melesat tinggi. Sektor ketiga yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan data (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017) menyumbang sebesar Rp 164.687,46 miliar. Provinsi Jawa Timur adalah penghasil padi, jagung, ayam potong, sapi potong dan budidaya hasil laut terbesar di Indonesia. Menurut Jusuf (2016) mengatakan bahwa Jawa Timur penghasil

41,3% ikan budidaya hasil laut; 32% jagung; 17,4% padi; 12,4% ayam potong; dan 7,9% sapi potong di Indonesia.

Pembangunan di Provinsi Jawa Timur dari segi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Faktor lain yang juga memengaruhi pembangunan dan dapat menurunkan masalah kemiskinan, yaitu pembangunan terhadap manusia. Pengukuran pembangunan manusia diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan manusia dengan menurunkan angka kemiskinan, sehingga pelaku pembangunan adalah manusia. Kualitas pemenuhan kebutuhan manusia baik, maka mencerminkan bahwa manusia dapat dikatakan terbebas dari kemiskinan. Ketika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah sedikit, maka angka kemiskinan juga akan sedikit, demikian pula sebaliknya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperlukan oleh suatu daerah untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan informasi dari BPS Provinsi Jawa Timur (2018) menyebutkan bahwa penilaian IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga penilaian tersebut jika dipenuhi dengan baik, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan terbebas dari kemiskinan. Jumlah penduduk yang tergolong miskin sedikit, maka angka kemiskinan juga semakin mengecil. Peningkatan IPM dilakukan guna melihat keberhasilan pembangunan bidang sosial pada suatu wilayah. Berdasarkan tabel 1.1 angka IPM Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2016 mengalami kenaikan. Nilai IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2016 yaitu 69,74 dan berdasarkan pengkategorian IPM, nilai tersebut termasuk kategori pembangunan manusia tinggi (BPS Provinsi Jawa Timur, 2015).

Kenaikan IPM dikarenakan oleh tiga komposisi IPM yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak yang juga mengalami peningkatan. Kenaikan yang terjadi pada setiap kabupaten/kota berbeda dan mengalami fluktuatif. Kesehatan dilihat dari angka harapan hidup yaitu mengidentifikasi bahwa jumlah rata-rata tahun yang akan ditempuh oleh seseorang ketika hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka mengindikasikan keberhasilan daerah tersebut pada bidang kesehatan tergolong

baik, demikian pula sebaliknya. Angka harapan hidup masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2016 berkisar antara 62,84-73,87 (BPS, 2018) yang artinya rata-rata umur masyarakat yaitu 62 tahun 10 bulan 6 hari sampai 73 tahun 10 bulan 17 hari.

Tingkat pendidikan dilihat dari dua aspek, yaitu angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 berkisar antara 6,85-7,23 tahun (BPS Provinsi Jawa Timur, 2018). Angka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus jenjang SMP kelas 8. Angka harapan sekolah yaitu banyaknya tahun yang dapat dinikmati oleh penduduk usia tertentu dalam mengenyam pendidikan. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, maka pemerataan pendidikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat semakin baik. Angka harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 berkisar antara 11,74-12,98 tahun (BPS Provinsi Jawa Timur, 2018). Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga lulus SMA, bahkan memasuki jenjang perguruan tinggi pada tahun pertama atau setara dengan D-1.

Standar hidup layak dilihat dari jumlah PNB per kapita pada suatu daerah. PNB per kapita yaitu menggambarkan pengeluaran yang dikeluarkan per orang demi memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi tingkat PNB, berarti semakin banyak jumlah pendapatan yang dikeluarkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. PNB per kapita pada Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2016 mengalami kenaikan dari Rp 9.002.000 sampai Rp 10.715.000 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2018). Jumlah tersebut merupakan rata-rata pengeluaran selama satu tahun dari masing-masing individu. Semakin tinggi angka pengeluaran, maka semakin terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu tersebut. Semakin tinggi tingkat pengeluaran masyarakat, hal tersebut mengidentifikasikan bahwa masyarakat mampu membeli barang ataupun jasa untuk dikonsumsi dengan jumlah yang banyak. Ketika pengeluaran tersebut meningkat, maka IPM juga

semakin meningkat karena IPM dipengaruhi oleh tiga komposisi, dan hal itu menunjukkan bahwa penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik.

Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk seseorang bertahan hidup ialah kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan papan. Meskipun ada kebutuhan sekunder dan tersier di luar pembahasan ini. Namun, kebutuhan dasar menjadi tolak ukur bagi seseorang dari segi ekonomi. Ketiga kebutuhan tersebut akan mudah dipenuhi oleh masyarakat jika mereka memiliki cukup uang melakukan pembelian. Seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya disebut terbebas dari masah kemiskinan, sedangkan yang berada di lingkup tidak dapat memenuhi kebutuhannya disebut berada dalam kemiskinan.

Kemiskinan merupakan indikasi dari ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dari segi ekonomi. Kemiskinan menjadi permasalahan setiap daerah dan periode waktu tertentu dengan kadarnya masing-masing, termasuk Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2016 yaitu 39.075.152 jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017). Jumlah tersebut merupakan terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat, yakni 47.379.389 jiwa (BPS Provinsi Jawa Barat, 2018). Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan lapangan pekerjaan yang memadai, maka masyarakat Jawa Timur dapat bekerja yang pendapatannya dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Namun, jumlah penduduk yang tergolong miskin di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi, bahkan menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia yakni 4.708.555.816 jiwa (BPS Pusat, 2018).

Pulau Jawa merupakan pulau dengan distribusi PDRB ADHK 2010 tertinggi dari kelima pulau yang ada di Indonesia, yaitu sebesar Rp 5.544.826 miliar dari total keseluruhan Rp 9.433.034 miliar (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017). Jumlah PDRB tersebut, disumbangkan oleh Provinsi Jawa Timur dari 17 lapangan usaha menduduki sebagai peringkat kedua sebagai penyumbang PDRB terbesar di Pulau Jawa, bahkan terbesar kedua pula di Indonesia setelah DKI Jakarta, yaitu senilai Rp 1.405.236 miliar (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017). Jika dikaitkan dengan tenaga kerja, maka tingginya PDRB berarti tingginya produktivitas tenaga kerja pada masing-masing sektor lapangan usaha. Ketika PDRB pada suatu wilayah

tinggi, maka seharusnya masyarakatnya banyak yang terserap pada lapangan usaha tersebut, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari pendapatan yang diperoleh. Namun, hal ini bertolak belakang dengan jumlah masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur yang notabene masih banyak yaitu 4.708.555.816 jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2018).

Angka kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk yang tergolong miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu wilayah. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mencapai 12,05% (BPS Provinsi Jawa Timur, 2018). Persentase tersebut melebihi rata-rata angka kemiskinan di Indonesia yaitu 10,70% pada tahun 2016 (BPS Pusat, 2018). Angka kemiskinan yang tinggi ini merupakan masalah besar bagi Provinsi Jawa Timur. Nilai PDRB yang besar seharusnya dapat meminimalkan angka kemiskinan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Berdasarkan tabel 1.1 angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur beberapa tahun terakhir terjadi penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 terjadi penurunan.

Pembangunan bukan saja hanya dilihat dari segi kuantitas produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah, melainkan tujuan pembangunan yang sebenarnya ialah mensejahterakan manusia dan terbebas dari masalah kemiskinan. Salah satu upaya menciptakan kesejahteraan manusia yaitu dengan peningkatan modal manusia yang dilihat dari nilai IPM. Nilai IPM yang tinggi mencerminkan bahwa kehidupan manusia dapat terpenuhi dengan utuh. Faktor lain yang dapat mengurangi angka kemiskinan yaitu tingginya kualitas manusia yang dapat dilihat dari nilai IPM. Laporan UNDP menyebutkan posisi IPM Indonesia pada tahun 2016 menempati urutan 113 dari 188 negara di dunia (Zabidi, 2017). Peringkat tersebut menurun dari tahun 2015 yaitu berada di posisi 110. IPM Provinsi Jawa Timur berdasarkan tabel 1.1 dari tahun 2010-2016 justru mengalami kenaikan dan tidak mengikuti tren penurunan seperti posisi IPM Indonesia.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan di bidang ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 mengalami kenaikan yang dilihat dari sektor PDRB. Pembangunan di bidang sosial dengan melihat kualitas sumber daya manusia juga mengalami kenaikan.

Kedua faktor tersebut secara teori dapat mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Jawa Timur mengalami fluktuatif, yaitu: penurunan pada tahun 2010-2014, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2016. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016.”** Penelitian ini dilakukan dengan mengacu data tahun 2010-2016, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan kontribusi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang (tahun berikutnya) untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016?
- 1.2.2 Manakah di antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih dominan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui pengaruh yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.
- 1.3.2 Menganalisis antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia yang paling dominan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini untuk berbagai pihak, di antaranya:

- 1.4.1 Pemerintah, dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan dalam meningkatkan faktor yang memicu penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- 1.4.2 Perguruan tinggi, sebagai salah satu sarana literasi di perguruan tinggi guna pembelajaran ataupun referensi penelitian.
- 1.4.3 Pembaca, sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis dan lebih detail.
- 1.4.4 Peneliti, mengetahui pengaruh dan menganalisis antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai kajian dasar teori yang digunakan untuk penelitian, di antaranya meliputi: tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan; landasan teori tentang Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan angka kemiskinan; hubungan antar variabel; hipotesis penelitian; dan kerangka berpikir penelitian.

### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan kegiatan tersebut, peneliti memperoleh tujuh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sussy Susanti (2013)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, pengangguran dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 99,7% terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Secara parsial, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 0,2249497. Secara teori sementara pengaruh PDRB terhadap kemiskinan yaitu bersifat negatif, tetapi dalam penelitian ini hasilnya positif. Penyebabnya ialah kemungkinan PDRB di Jawa Barat tidak menyentuh secara langsung dalam me-ngentaskan masyarakat miskin. Variabel pengangguran berpe-ngaruh positif dan signifikan terhadap variabel angka kemiskinan sebesar 0,4986606. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel angka kemiskinan sebesar -11,9757.	Penelitian yang dilakukan Sussy Susanti yaitu pada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2009-2011. Data penelitian Sussy Susanti yaitu sebanyak 98 observasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 266 observasi dari 38 kabupaten/kota dari tahun 2010-2016. Kemiskinan merupakan masalah yang multi-dimensi, sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang tepat diperlukan data dinamis karakteristik dari observasi/individu dari waktu ke waktu yang lebih banyak. Analisis data yang digunakan oleh Sussy yaitu dengan program Stata, sedang-

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
				kan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan <i>Eviews</i> karena lebih mudah dalam pengaplikasian dan dalam pengolahan data tidak perlu untuk mengetik perintah/ <i>command</i> seperti pada program Stata.
2.	Ni Komang Meriyanti (2015)	Pengaruh Program Indeks Pembengunaan Manusia (IPM) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program IPM berada pada kategori sangat baik dan pengentasan kemiskinan berada pada kategori baik. Koefisien korelasi sebesar 0,594 berpengaruh positif dan signifikan. Sumbangan program IPM terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Buleleng sebesar 35,2%.	Penelitian Ni Komang Meriyanti hanya sebatas satu wilayah kecamatan saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada satu Provinsi dengan masing-masing karakter individu penelitian per kabupaten/kota, sehingga cakupannya lebih luas.
3.	Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, dan Richard L. H. Tumilaar (2016)	Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (dalam Tahun 2005-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, belanja modal dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sebesar 79,48%. Secara parsial, variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yaitu koefisien sebesar 1.057303. IPM berpengaruh negatif dan signifikan sebesar -1.433856 terhadap kemiskinan.	Analisis data penelitian Lavenia Kotambunan, dkk yaitu dengan analisis data panel program <i>Eviews 8.0</i> sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan program <i>Eviews 9.0</i> . Kedua program tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu salah satunya untuk penelitian data panel, hanya saja alternatif pilihan pengujian yang disediakan oleh <i>Eviews 9.0</i> lebih bervariasi.
4.	Nurul Fadlillah, Sukiman, dan Agustin Susyatna Dewi	Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu sebesar	Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadlillah, dkk yaitu dengan <i>Random Effect</i>

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
	(2016)	Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013.	0,3267. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0,006. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar -0,0498. Variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif sebesar -0,0009.	<i>Model</i> (REM), sedangkan pada penelitian ini direncanakan akan menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) karena dari ketiga model estimasi yaitu, <i>Pooled Least Square</i> (PLS), <i>Fixed Effect Model</i> (FEM), dan <i>Random Effect Model</i> (REM) yang lebih baik yaitu FEM.
5.	Ardi Anindita dan Maslihatin Utami (2017)	Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran, dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan sangat kuat ( $r^2 = -0,806$ ) dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan sebesar 65%. Jumlah pengangguran memiliki hubungan sangat kuat ( $r^2 = 0,847$ ) dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan sebesar 72%. Kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan IPM memiliki hubungan sangat kuat ( $r^2 = -0,663$ ) dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan sebesar 44%.	Program yang digunakan dalam penelitian Ardi Anindita dan Maslihatin Utami yaitu program SPSS, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan <i>Eviews 9.0</i> karena analisisnya lebih lengkap untuk menjawab fenomena ekonomi (kemiskinan) yang lebih bervariasi dan jangka waktunya panjang.
6.	M. Alhudori (2017)	Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Miskin di Provinsi Jambi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel IPM berpengaruh positif sebesar 0,358 terhadap kemiskinan. PDRB berpengaruh negatif sebesar -0,006 terhadap kemiskinan. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif sebesar 0,010 terhadap kemiskinan	Penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori dilakukan pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun 2006-2015, sehingga jumlah observasinya 110. Penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan jumlah observasi lebih banyak, yaitu 266 observasi. Analisis data yang digunakan yaitu OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> ) dengan program <i>Eviews 9.0</i> . Penelitian M. Alhudori dengan uji asumsi kla-

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
7.	Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenik Woyanti (2018)	Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengang- guran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 0,181. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa tengah sebesar -2,527. Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa tengah sebesar -2,742 dan pengangguran yang dipresentasikan dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,102.	<p>sik uji multikolinieritas dan autokorelasi, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan karena diperlukan untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya, sedangkan uji autokorelasi tidak perlu dilakukan karena data penelitian adalah data panel.</p> <p>Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenik Woyanti yaitu data panel dengan estimasi FEM, hal ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan. Variabel Y yang digunakan oleh Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenik Woyanti yaitu tingkat kemiskinan, sedangkan dalam penelitian ini yaitu angka kemiskinan. Keduanya merupakan pengukuran untuk persentasi perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total.</p>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kontribusi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai acuan untuk memperkuat hipotesis dengan berlandaskan teori yang dipakai. Hasil penelitian nantinya akan menjawab permasalahan yang telah dipaparkan, serta hasil temuan, apakah sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kesimpulan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu bahwa variabel PDRB dan IPM dominan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga kesimpulan ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan.

## **2.2 Landasan Teori**

Penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada teori atau konsep yang dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan.

### **2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pembangunan pada sektor ekonomi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Tambunan (2016:45-46) mengatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi dengan laju yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Jadi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kesejahteraan juga tercipta. Secara ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan PDB untuk negara, dan dikenal dengan istilah PDRB untuk wilayah. Menurut Sukirno (2015:34) mengatakan bahwa “Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu.” Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah tertentu dalam satu tahun tertentu.

Selanjutnya, BPS Provinsi Jawa Timur (2017:3) memberikan definisi mengenai PDRB dalam pernyataannya bahwa:

“PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang diproduksi pada periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian diturunkan menjadi nilai tambah.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari barang ataupun jasa yang diproduksi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicirikan dengan semakin meningkatnya PDRB pada daerah tersebut yang dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Perhitungan PDB dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Tambunan (2015:47), mengatakan bahwa:

“PDB dapat diukur melalui tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat, sedangkan pendekatan pengeluaran adalah perhitungan PDB dari sisi permintaan agregat. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah Nilai *Output* (NO) dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha.”

Besarnya PDRB ditentukan dari perhitungan pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu per tahun. Sukirno (2015:33) menyebutkan bahwa untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian melalui tiga cara perhitungan, yaitu:

- a. cara pengeluaran, yaitu dengan menghitung jumlah nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut,
- b. cara produksi atau produk neto, yaitu PDRB dihitung berdasarkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian, dan
- c. cara pendapatan, yaitu diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Perhitungan tersebut diaplikasikan dalam perhitungan BPS. Metode perhitungan PDRB menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2017:4) ada tiga pendekatan, yaitu:

#### 1) Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (kategori), yaitu: a) pertanian, kehutanan, dan perikanan; b) pertambangan dan penggalian; c) industri pengolahan; d) pengadaan listrik dan gas; e) pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang; f) konstruksi; g) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; h) transportasi dan pergudangan; i) penyediaan akomodasi dan makan minum; j) informasi dan komunikasi; k) jasa keuangan dan asuransi; l) real estat; m) jasa perusahaan; n) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; o) jasa pendidikan; p) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan q) jasa lainnya.

#### 2) Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

#### 3) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) pengeluaran konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir

yang dihasilkan dan akan sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto. Penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan pendekatan produksi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan PDRB melalui dua model, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2017:3) mengatakan bahwa “PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.” Keduanya disusun dan digunakan berdasarkan masing-masing kebutuhan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini menggunakan data PDRB dengan pendekatan produksi. Berdasarkan kenyataan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat bukan saja berasal dari dalam daerah sendiri, melainkan ada kalanya berasal dari luar daerah. Demikian pula dengan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah, tidak semua digunakan oleh masyarakat di wilayah tersebut, tetapi sebagian ada yang dijual ke luar wilayah. Sehingga, perhitungan dipilih dengan metode produksi dengan tujuan untuk mengetahui nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi masyarakat pada suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Menurut Tarigan (2009:24) mengemukakan bahwa pendekatan produksi digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang diproduksi yang berbentuk barang/fisik. Selain itu, pendekatan ini dipilih karena mengidentifikasi keadaan ekonomi sesungguhnya. Sukirno (2015:42) mengemukakan bahwa:

“Penggunaan cara menghitung produk neto (cara produksi) memiliki dua tujuan penting, yaitu untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional dan sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali-yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.”

Selain itu, PDRB yang dipilih yaitu dengan metode penyusunan berdasarkan atas harga konstan (riil) tahun 2010 untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur yang ditampilkan dalam bentuk data per kabupaten/kota.

### 2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

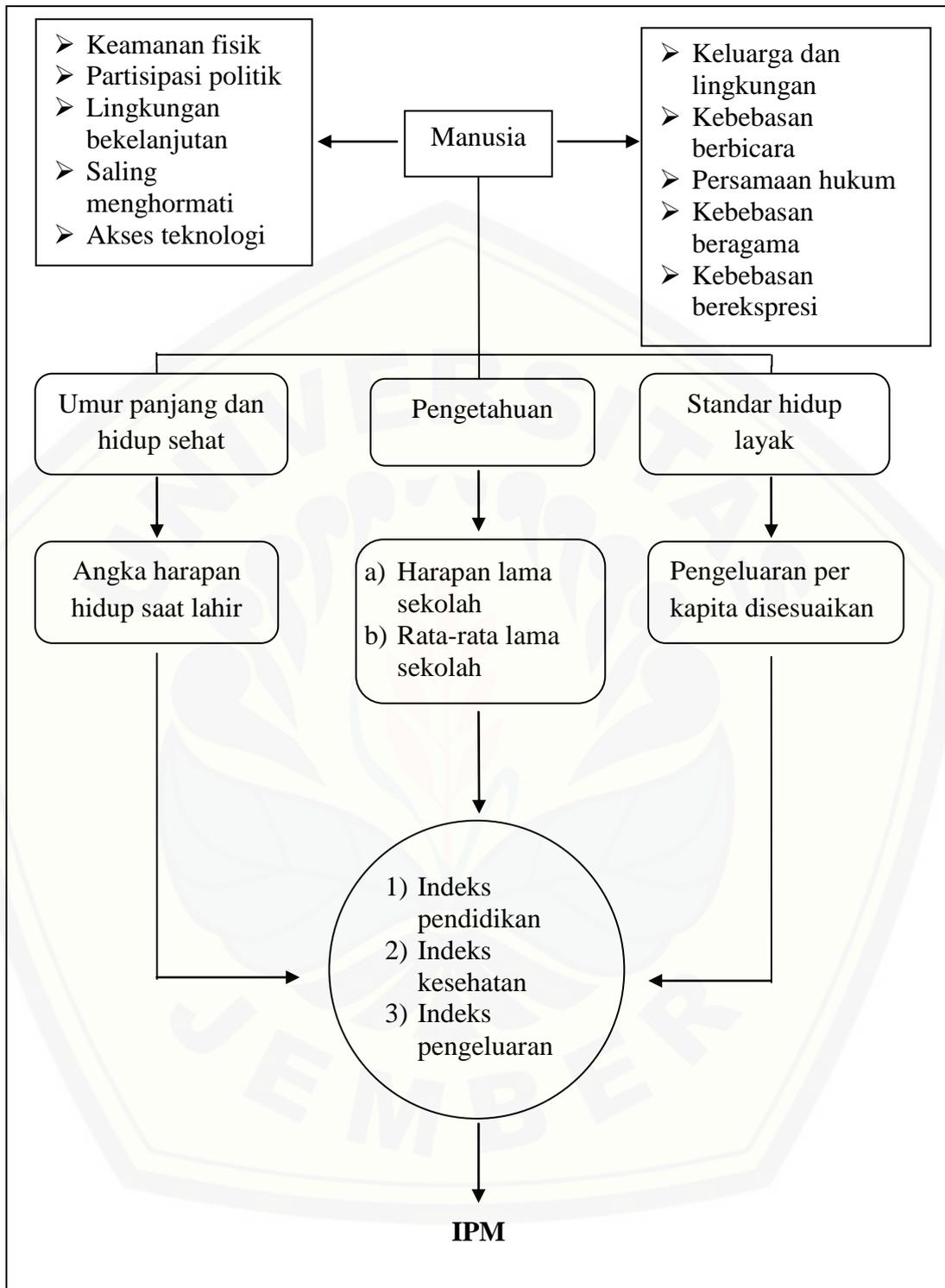
Konsep mengenai pembangunan akhir-akhir ini lebih menekankan pada pembangunan manusia. Pembangunan di bidang non ekonomi ialah pembangunan bidang sosial yaitu pada sumber daya manusia. Manusia sebagai tujuan pembangunan dan manusia juga yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, sehingga manusia menduduki peran penting dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pengukuran yang holistik (menyeluruh) untuk mengetahui kualitas manusia. Jhingan (2014:75) mengemukakan bahwa “pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi menekankan pada efisiensi mereka.” Teori ini menekankan pada kualitas manusia sebagai agen dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggi juga harus diimbangi dengan IPM yang tinggi pula.

Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2018) disebutkan dalam beberapa keterangan, sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
- d. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya
- e. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Todaro dan Smith (2011:57) mengatakan, “indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan (*United Nations Development Program*) UNDP yang berjudul *Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia).” Inti dari laporan yang dimulai sejak 1990 tersebut yaitu pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*-HDI). IPM dengan metode baru dibentuk oleh 3 (tiga) indikator, BPS Provinsi Jawa Timur (2015) diantaranya yaitu:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) didasarkan pada Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Apabila AHH tinggi, maka mencerminkan masyarakat hidup sehat sehingga umur mereka juga tinggi.
- 2) Pengetahuan (*knowledge*) merupakan pendidikan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang dilihat dari dua kategori yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan ini dikenakan pada pendidikan selanjutnya yang akan ditempuh masyarakat setelah lulus SMP.
- 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*) yaitu pengukuran untuk kelayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi banyaknya jumlah pengeluaran riil. Perhitungannya dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.



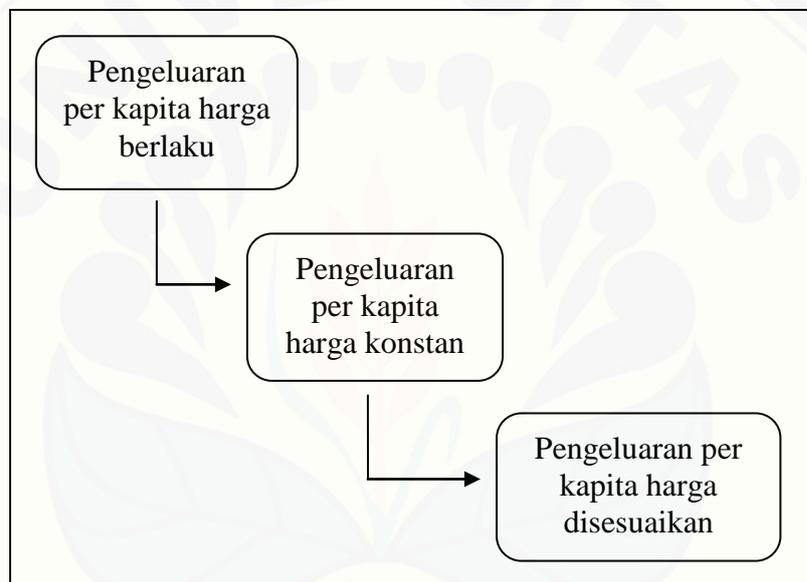
Gambar 2.1 Indikator IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa manusia memiliki hak untuk menjaga keamanan fisik, berpartisipasi politik, lingkungan berkelanjutan, saling menghormati, memperoleh akses teknologi, memiliki keluarga dan lingkungan, kebebasan berencana, memiliki persamaan hukum, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Manusia dalam melakukan banyak hal tersebut tercakup dalam tiga dimensi atau ranah yang dipenuhi. Ketiga dimensi tersebut yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator umur panjang dan hidup sehat dapat dilihat dari angka harapan hidup saat lahir manusia. Indikator pendidikan dapat dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah. Sedangkan indikator standar hidup layak dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Keempat indikator tersebut dikalkulasi menjadi indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, yang ketiganya disatukan menjadi Indeks Pembangunan Manusia. Berikut rinciannya:

- a) Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy - e0*), yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
- b) Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*), yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
- c) Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*), yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2010=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas yaitu 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Berikut disajikan alur pengeluaran per kapita dalam masyarakat.



Gambar 2.2 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan gambar di atas, perhitungan pengeluaran per kapita metode baru dimulai dari menghitung jumlah pengeluaran per kapita berdasarkan harga berlaku. Kemudian rumus selanjutnya untuk menghitung pengeluaran per kapita berdasarkan harga konstan dengan menjadikan IHK (2010)= 100. Paritas daya beli dihitung berdasarkan komoditas makanan dan non makanan, sehingga terciptalah pengeluaran per kapita berdasarkan harga disesuaikan. Persentase pengeluaran kebutuhan rumah tangga masyarakat terdiri dari makanan (66 komunitas atau setara dengan 39,8%) dan non makanan (30 komunitas atau setara

dengan 36,9%), sehingga totalnya adalah 96 komunitas dengan 76,7% dari total pengeluaran.

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Badan Pusat Statistik (2015) yaitu sebagai berikut:

(1) Cara perhitungan dimensi kesehatan, yaitu:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

(2) Cara perhitungan dimensi pendidikan, yaitu:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

(3) Cara perhitungan dimensi pengeluaran, yaitu:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{Pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{\min})}$$

Perhitungan masing-masing dimensi IPM seperti yang dipaparkan di atas, sehingga perhitungan IPM secara keseluruhan sebagai rata-rata geometrik dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Perhitungan IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut disajikan tabel untuk masing-masing nilai tersebut.

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka harapan hidup saat lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka harapan lama sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata lama sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rupiah	100 (PPP U\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.35 2**(Rp)

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pencapaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori.

Tabel 2.3 Pengkategorian IPM

No	Nilai IPM	Kategori
1	$IPM < 60$	Rendah
2	$60 \leq IPM < 70$	Sedang
3	$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
4	$IPM \geq 80$	Sangat tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Menurut Todaro dan Smith (2011:57) HDI berusaha memeringkat IPM dari skala 0-1. Secara rinci pemeringkatan tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: pembangunan manusia rendah (0,0 sampai 0,499), pembangunan manusia sedang (0,50 sampai 0,799), pembangunan manusia tinggi (0,80 sampai 0,90), dan pembangunan manusia sangat tinggi (0,90 sampai 1,0). Dapat disimpulkan bahwa pembangunan dari segi non ekonomi atau sosial dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Perhitungan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### 2.2.3 Angka Kemiskinan

Menurut Sholeh (dalam Khomsan, dkk., 2015:1) mengatakan “definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.” BPS Provinsi Jawa Timur(2018) mengartikan “kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan.” Kemiskinan dihitung berdasarkan tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (*basic needs*).

Arsyad (2016:81) mengatakan bahwa “lingkaran kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling memengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Pendapat ini dilandaskan oleh konsep dari Nurkse yang mengungkapkan “*a country is poor because it is poor.*” Salah satu faktor yang diidentifikasi Nurkse sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal.



formal, infrastruktur dasar rumah tangga, dan kesehatan. Sedangkan menurut Khomsan dkk (2015:33), indikator kemiskinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Konsumsi pangan

Pangan sumber protein adalah pangan yang digunakan sebagai lauk-pauk sehari-hari (melengkapi makanan pokok) dan menjadi zat gizi pengatur metabolisme dalam tubuh sehingga dapat menjamin pertumbuhan optimal. Beberapa pangan hewani seperti daging selain mengandung protein juga diketahui mengandung zat besi tinggi yang berperan untuk mencegah anemia gizi besi. Pemilihan protein hewani seperti daging sapi dan ikan asin dilakukan karena kedua jenis jenis lauk tersebut mewakili jenis protein yang memiliki nilai ekonomis berbeda.

Tabel 2.4 Statistik Rumah Tangga Berdasarkan Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan

Kebutuhan Pangan	Kategori rumah tangga (rata-rata $\pm$ s.d.)	
	Miskin	Tidak Miskin
Banyaknya tersaji menu daging sapi dalam satu minggu terakhir	0,1 $\pm$ 0,5	1,1 $\pm$ 1,9
Banyaknya tersaji menu ikan asin dalam satu minggu terakhir	7,1 $\pm$ 3,8	5,3 $\pm$ 5,0

Sumber: Khomsan dkk (2015:34)

Kualitas menu protein hewani yang disajikan dapat tergambar dari seberapa besar anggota rumah tangga mengkonsumsi daging sapi dan ikan asin per minggu. Secara keseluruhan, rumah tangga miskin mengonsumsi daging sapi lebih sedikit dan ikan asin lebih banyak per minggunya dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

b. Sandang

Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sandang dapat dilihat dari banyaknya anggota rumah tangga yang mampu mengakses baju baru dalam kurun waktu setahun terakhir.

Tabel 2.5 Statistik Rumah Tangga Berdasarkan Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Sandang

Kebutuhan Sandang	Kategori rumah tangga (rata-rata $\pm$ s.d.)	
	Miskin	Tidak Miskin
Banyaknya anggota rumah tangga yang membeli baju baru	3,7 $\pm$ 1,9	3,9 $\pm$ 1,5
Rasio banyaknya anggota rumah tangga yang membeli baju baru dibandingkan jumlah anggota rumah tangga	79,6 $\pm$ 29,2	92,5 $\pm$ 19,1
Jumlah baju baru yang dibeli	6,4 $\pm$ 4,7	7,4 $\pm$ 3,8
Banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki baju berbeda untuk di rumah dan acara keluar rumah	4,6 $\pm$ 2,4	4,2 $\pm$ 1,4
Rasio banyaknya rumah tangga yang memiliki baju berbeda untuk di rumah dan acara keluar rumah dibandingkan jumlah anggota rumah tangga	95,4 $\pm$ 13,7	97,5 $\pm$ 8,2

Sumber: Khomsan dkk (2015:34)

Tidak berbeda jauh dengan data statistik rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, sebaran sebagian besar rumah tangga baik kategori rumah tangga miskin maupun tidak miskin memiliki kemampuan untuk membeli sedikitnya satu stel pakaian dalam setahun. Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa keluarga dengan kategori rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin memiliki akses yang relatif sama besar dalam memenuhi kebutuhannya.

#### c. Papan

Keadaan rumah yang sehat dapat tergambarkan dari cukup tidaknya ventilasi udara. Berdasarkan luas ventilasi udara, keluarga dengan kategori rumah tangga tidak miskin memiliki ventilasi udara yang lebih luas, yaitu (5,1 m<sup>2</sup>) bila dibandingkan dengan keluarga miskin yang hanya sebesar 3,3 m<sup>2</sup>. Bila dilihat dari rasio luas ventilasi udara dibandingkan luas rumah, baik keluarga dengan kategori rumah tangga miskin maupun tidak miskin memiliki rasio yang sama, yaitu

sebesar 5,6%. Persamaan rasio tersebut bila dibandingkan dengan luas ventilasi udara antara rumah tangga miskin dan tidak miskin menunjukkan kesimpulan bahwa total luas rumah pada keluarga dengan kategori rumah tangga tidak miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan total luas rumah pada rumah tangga miskin.

Tabel 2.6 Statistik Rumah Tangga Berdasarkan Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Papan

Kebutuhan Papan	Kategori rumah tangga (rata-rata $\pm$ s.d.)	
	Miskin	Tidak Miskin
Luas ventilasi udara	3,3 $\pm$ 3,7	5,1 $\pm$ 6,6
Rasio luas ventilasi udara dibandingkan luas rumah	5,6 $\pm$ 5,5	5,6 $\pm$ 7,4
Pengeluaran listrik rumah tangga satu bulan terakhir (Rp)	50.667 $\pm$ 27.058	98.100 $\pm$ 103.561
Jumlah kamar mandi yang dimiliki rumah tangga	0,9 $\pm$ 0,4	1,3 $\pm$ 0,9
Luas total kamar mandi yang dimiliki rumah tangga (m <sup>2</sup> )	2,5 $\pm$ 1,7	3,8 $\pm$ 2,9
Rasio luas total kamar mandi dibandingkan luas rumah (m <sup>2</sup> )	4,9 $\pm$ 4,5	4,0 $\pm$ 3,5
Pengeluaran bahan bakar (minyak tanah/gas) satu bulan terakhir (Rp)	36.607 $\pm$ 17.981	50.450 $\pm$ 22,192

Sumber: Khomsan dkk (2015:34)

Terjadinya perbedaan yang signifikan antara keluarga miskin dan tidak miskin tidak hanya terlihat dari luas ventilasi udara tetapi juga dari total pengeluaran listrik rumah tangga per bulan. Rata-rata pengeluaran listrik per bulan keluarga rumah tangga tidak miskin hampir 2 kali lipat (Rp 98.100) dari pengeluaran listrik per bulan rumah tangga miskin yang hanya Rp 50.667.

Pengukuran kemiskinan oleh BPS (2015) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan persentase jumlah

penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk keseluruhan, atau dengan kata lain, angka kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total pada suatu wilayah.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan :

$$\text{Angka Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk Total}} \times 100\%$$

Penduduk miskin jika berada di bawah garis kemiskinan.

$$\text{GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM dilakukan dengan beberapa tahap, di antaranya yaitu:

- 1) Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi

umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

- 2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Selanjutnya, dalam menentukan rumah tangga yang tergolong miskin, BPS (dalam Isdijoso, Suryahadi, dan Akhmadi, 2016:7) menggunakan 14 variabel pengukuran, untuk menyebut sebuah keluarga tergolong miskin, di antaranya yaitu:

- (1) Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
- (2) Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- (3) Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;

- (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
- (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- (6) Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
- (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- (8) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- (9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- (10) Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
- (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan;
- (13) Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidaksekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
- (14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan atau batas kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu untuk dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi suatu wilayah. Garis kemiskinan berdasarkan pendapatan untuk masing-masing kabupaten/kota di seluruh provinsi yang ada di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan garis kemiskinan tersebut didasarkan dengan harga barang-barang yang berlaku di wilayah tersebut dan besarnya inflasi yang memengaruhinya. Adapun garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2016 sesuai rata-rata dari garis kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7 Garis Kemiskinan Provinsi Berdasarkan Jumlah Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

No	Tahun	Garis Kemiskinan Pendapatan/Kapita/Bulan
1	2010	218.568
2	2011	227.602
3	2012	243.783
4	2013	273.758
5	2014	289.945
6	2015	305.171
7	2016	321.761

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

Nilai garis kemiskinan antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh garis kemiskinan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2016 mengalami kenaikan. Besarnya garis kemiskinan ditentukan oleh harga bahan pokok dan besarnya inflasi di masing-masing daerah tersebut. Apabila jumlah pendapatan seseorang melebihi besarnya 1 rupiah saja dari garis kemiskinan, maka seseorang tersebut dikatakan terbebas dari kemiskinan. Namun, sebaliknya apabila pendapatan seseorang berada di bawah ataupun sama dengan garis kemiskinan, maka seseorang tersebut tergolong miskin.

### 2.3 Hubungan antar Variabel

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 2.3.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Angka Kemiskinan

Teori pertumbuhan klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan. Menurut Smith, setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri; karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat, Jhingan (2014:81). Pertumbuhan ekonomi diawali dengan pembagian kerja syarat mutlak

pembangunan ekonomi ialah penumpukan modal sebelum pembagian kerja, sehingga manusia mampu menabung dan menanam modal.

Smith (dalam Jhingan, 2014:85) mengemukakan pertumbuhan ekonomi bersifat menggumpal (kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik meningkatnya penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Namun, jika pertumbuhan ekonomi berhenti, pemupukan modal berhenti, penduduk menjadi stasioner, keuntungan minimum, upah berada pada tingkat kehidupan minimal, tidak ada perubahan pendapatan per kapita, serta produksi dan perekonomian macet. Keadaan stasioner adalah muram dan kesengsaraan semakin parah. Hidup di dalam keadaan stasioner adalah sulit bagi berbagai lapisan masyarakat, dan sengsara di dalam keadaan yang merosot. Keadaan yang demikian disebut dengan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB wilayah, berdasarkan hipotesis Kuznets yang mengatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pendapat ini menunjukkan bahwa bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap angka kemiskinan, meskipun ada faktor lain yang juga memengaruhinya. Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan *output* produksi(PDRB) terhadap angka kemiskinan menghasilkan suatu konsep, yaitu *trickle down effect*. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja dan upah/gaji riil, sehingga akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi bisa menjadi alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan, (Tambunan, 2015:110).

### **2.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan**

Pembangunan dan kemiskinan merupakan dua permasalahan yang seringkali dihadapi suatu wilayah. Angka kemiskinan akan mengecil, jika pembangunan dapat menjangkau masyarakat. Pembangunan bukan saja hanya

pada sudut pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada manusianya. Todaro dan Smith (2011:57) mengatakan bahwa “pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti luas, bukan sekadar pendapatan yang tinggi.” Kesehatan dan pendidikan merupakan komponen modal manusia (*human capital*) yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia.

Faktor yang memengaruhi pembangunan bukan saja berasal dari modal fisik, melainkan juga modal manusia. Menurut Sun'an dan Senuk (2015:107) mengemukakan bahwa “model pembangunan manusia perlu *diredesain* dengan berbasis pada investasi sosial untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemandirian untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.” Kebijakan investasi sosial ini bukan saja untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasarnya saja, melainkan dalam masyarakat timbul percaya diri sehingga timbul dalam dirinya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Investasi sosial untuk mengedepankan kualitas manusia dapat ditingkatkan melalui IPM, sehingga dengan nilai IPM yang tinggi masyarakat lebih bertahan ketika menghadapi persoalannya, seperti halnya bertahan bahkan keluar dari zona yang disebut dengan kemiskinan

Pendapat lain dikemukakan oleh Griffin dan McKinley (dalam BPPD DIY, 2015:12) yang menyebutkan bahwa kemajuan pembangunan manusia ditandai dalam pengembangan beberapa aspek kehidupan masyarakat di mana orang bisa menikmati lebih lama dan hidup lebih sehat dan menjadi lebih terdidik dalam standar hidup yang wajar dan aspek-aspek lain seperti kebebasan politik dan harga diri. Pencapaian tersebut akan mendorong pemenuhan hidup yang utuh, produktif dan kesejahteraan manusia. Masyarakat sejahtera tentunya terbebas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa modal manusia (*human capital*) akan menarik pada suatu pembangunan sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang tergolong miskin, sehingga angka kemiskinan juga berkurang. Pembangunan manusia yang dinyatakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.

### **2.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan suatu daerah. Menurut Tambunan (2016:143) menyatakan bahwa angka kemiskinan dapat dikurangi jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja yang berarti akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan upah dari kelompok orang miskin. Pendapat ini mengikuti teori dari Kuznets yang mengatakan bahwa ketika awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan seperti juga kesenjangan dalam distribusi pendapatan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Menurut Tambunan (2016:144) menjelaskan bahwa faktor lain selain pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi angka kemiskinan, yaitu: pendidikan rata-rata penduduk atau angkatan kerja pada khususnya, struktur ekonomi, pola distribusi pendapatan, ketersediaan sumber daya alam, penguasaan teknologi, dan keseriusan pemerintah memerangi kemiskinan. Rata-rata pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Demikian pula dengan pola distribusi pendapatan juga termasuk bagian dari standar hidup layak dan termasuk indikator indeks pembangunan manusia.

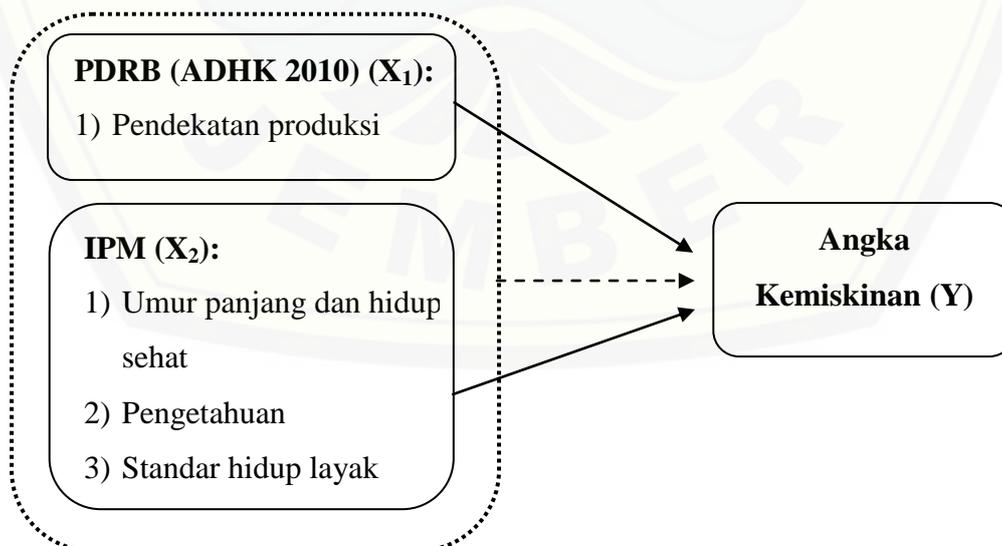
“Kesadaran bahwa pembangunan seyogianya menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan telah melahirkan model pembangunan yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar” (Sun’an dan Senuk, 2015:107). Kebutuhan dasar yang disebutkan dalam teori ini mengarah pada komponen IPM. Konsep pembangunan manusia ini muncul akibat kegagalan model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika keduanya saling berjalan. Jadi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja yang tinggi, melainkan kualitas manusia juga

harus tinggi untuk menciptakan kesejahteraan yang ditampilkan dengan menurunnya jumlah penduduk yang tergolong miskin.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan IPM berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hubungan variabel ini juga dipertegas dengan hasil penelitian dari Ardi Anindita dan Maslihatin Utami (2017) yang berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran, dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.” Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB dan IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap angka kemiskinan.

#### 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas diketahui bahwa pembangunan di bidang ekonomi dan sosial dapat mendorong menurunnya angka kemiskinan. Pembangunan di bidang ekonomi yang dilihat dari PDRB akan mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan di sektor sosial, yaitu manusia. Manusia merupakan modal dalam pembangunan non fisik yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Indeks pembangunan manusia yang terdiri dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang selanjutnya apabila terpenuhi dengan baik maka dapat menurunkan angka kemiskinan.



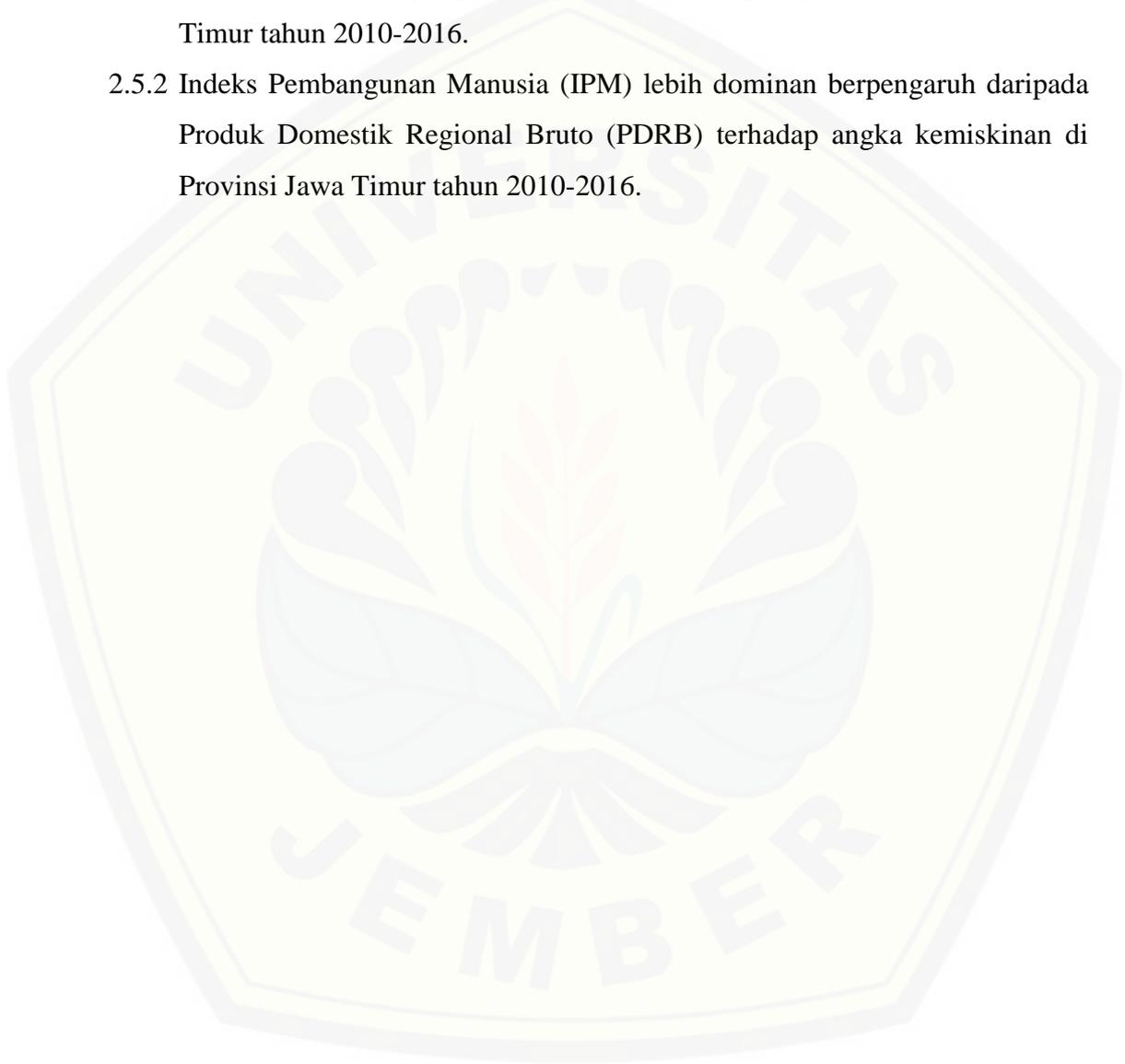
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010-2016.

2.5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih dominan berpengaruh daripada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian oleh peneliti. Adapun unsur-unsur metode penelitian yang akan dijelaskan pada bab ini, meliputi: rancangan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan pengujian.

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian berisi rencana penelitian yang akan dilakukan, sehingga hasil yang diperoleh mampu menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *eksplanatory* yaitu menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat, serta pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat melalui pengujian.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data panel (*pooled data*) yaitu penggabungan antara data *time series* (runtun waktu) yaitu dari tahun 2010-2016 dan *cross section* (data silang) yaitu data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan data panel ini bertujuan untuk menerangkan pengaruh variabel X terhadap Y yang sifatnya kompleks dan terjadinya dalam waktu yang panjang. Sehingga, data panel akan menjawab fenomena tersebut dengan detail. Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk mengetahui pengaruh PDRB dan IPM terhadap angka kemiskinan yang dilihat melalui data 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama tujuh tahun, yaitu dari tahun 2010-2016. Data bersumber dari dokumen Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan dinyatakan valid.

### 3.3 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan ketersediaan data yang memadai dalam penelitian. Selain itu, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mencapai 12,05% melebihi rata-rata angka kemiskinan di Indonesia yaitu 10,70% pada tahun 2016 (BPS Pusat, 2018). Nilai PDRB yang besar seharusnya dapat meminimalkan angka kemiskinan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur beberapa tahun terakhir terjadi penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 terjadi penurunan. IPM di Provinsi Jawa Timur juga mengalami kenaikan dari tahun 2010-2016, sementara angka kemiskinan tidak bergerak searah yaitu masih adanya kenaikan pada tahun 2015.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data secara valid. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi dokumen dan wawancara.

#### a. Metode Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh dari BPS serta literatur lain yang mendukung, seperti: jurnal, prosiding, dan hasil penelitian lainnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) PDRB dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang berasal dari dokumen BPS Provinsi Jawa Timur.
- 2) IPM yang meliputi data angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran masyarakat per kapita dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang berasal dari dokumen BPS Provinsi Jawa Timur.
- 3) Angka kemiskinan dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang berasal dari dokumen BPS Provinsi Jawa Timur.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperkuat hasil penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada salah satu responden, baik secara langsung (*face to face*) ataupun tidak langsung (menggunakan alat komunikasi sebagai penyalur komunikasi). Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang melakukan penyusunan daftar pertanyaan terlebih dahulu, sehingga yang ditanyakan oleh peneliti memiliki batasan-batasan tertentu dan tidak serta merta melakukan wawancara bebas. Tujuan dilakukannya wawancara ini yaitu untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai variabel yang diteliti, yaitu PDRB, IPM, dan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Wawancara yang akan dilakukan kepada pihak BPS Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43-44 Surabaya 60292.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya yaitu:

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Variabel ini menggambarkan jumlah nilai tambah suatu produksi barang atau jasa wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang dilihat dari PDRB per kabupaten/kota (dalam miliar rupiah).

#### b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel ini menggambarkan suatu pencapaian ukuran pembangunan manusia yang dilihat dari 3 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kualitas masyarakat. Pendidikan digambarkan oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Kesehatan digambarkan oleh angka harapan hidup masyarakat. Kualitas masyarakat dilihat dari segi pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya dihitung dan menghasilkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 dari 38 kabupaten/kota.

### c. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase dari jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total. Kemiskinan menggambarkan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai ketentuan dari BPS. Angka kemiskinan dinyatakan dalam bentuk persentase dan ditampilkan data per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel melalui program *EViews 9.0* sebagai pengolah data. “Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu (rumah tangga, perusahaan, kabupaten/kota, dll) pada periode waktu tertentu” (Ekananda, 2015:1). Data panel (*pooled data*) merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* (deret waktu) merupakan runtun waktu yang digunakan dalam penelitian. Data *cross section* merupakan data lintas sektor atau individual yang menggambarkan perbedaan antara objek penelitian. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan data panel, menurut Klevarken dan Hsiao (dalam Mukhlis dan Simanjuntak, 2017:37) yakni:

- a. Mampu mengontrol heterogenitas individu;
- b. Memberi informasi yang lebih banyak, lebih beragam atau meminimalkan masalah kolinieritas;
- c. Data panel lebih baik untuk studi *dynamics of adjustment*;
- d. Data panel mampu mengidentifikasi dan mengukur dampak yang secara seerhana tidak dapat dideteksi melalui penggunaan metode *time series* atau *cross section*; serta
- e. Model data panel mempermudah dalam membangun dan menguji model perilaku yang lebih kompleks daripada menggunakan model *time series* dan *cross section* secara sendiri-sendiri.

Rumus fungsi *time series* yaitu:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

Sedangkan rumus fungsi *cross section*, yaitu:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Sehingga, data panel merupakan gabungan dari kedua fungsi tersebut, sehingga ditulis

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan:

T : banyaknya waktu

N : banyaknya observasi

N x T : banyaknya data panel

Penelitian ini menempatkan angka kemiskinan sebagai fungsi dari laju PDRB dan IPM, sehingga persamaan fungsinya sebagai berikut:

$$AKM_{it} = f(PDRB_{it}, IPM_{it})$$

Berdasarkan fungsi di atas, ditransformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut:

$$AKM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

AKM : Angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur

PDRB : Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur

IPM : IPM Provinsi Jawa Timur

i : *cross section*

t : *time series*

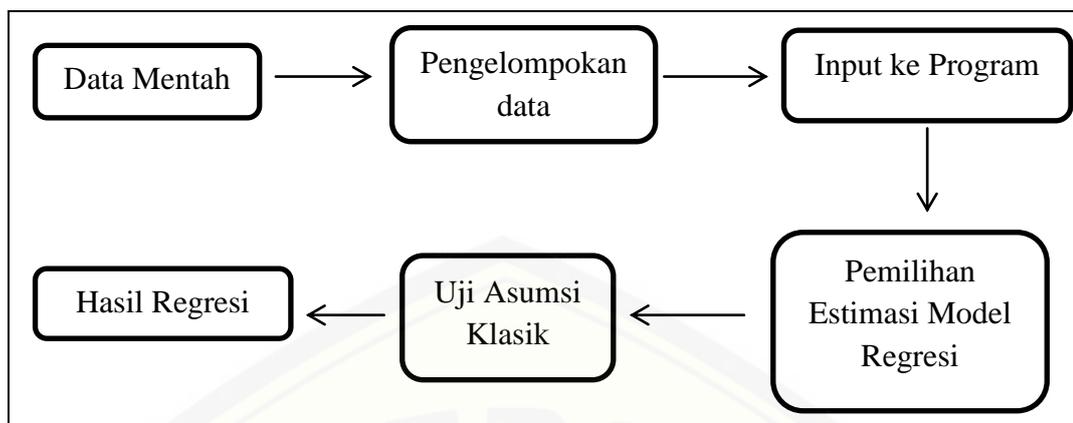
$\beta_0$  : konstanta

$\varepsilon$  : *error term*

Karena ada perbedaan satuan antara variabel X dan Y, maka dilakukan persamaan dengan mengubah data-data tersebut menjadi model semi logaritma (semilog). Sehingga persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Log } AKM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Analisis data dilakukan dengan sistematis sesuai langkah-langkah pengujian. Berikut disajikan cara menganalisis data dari mentah hingga pada *output* pengujian.



Gambar 3. 1 Sistematika Pengujian dengan Program *EViews 9.0*

Langkah-langkah dalam pengujian data melalui program *EViews 9.0* di antaranya, yaitu:

- 1) Data mentah, merupakan data mengenai PDRB ADHK 2010, data IPM, dan angka kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 yang berasal dari dokumen BPS Provinsi Jawa Timur.
- 2) Data diurutkan di program *Ms. Excel* terlebih dahulu secara vertikal dari atas ke bawah, sesuai tahun terkecil ke tahun terbesar, yaitu masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan urutan tahun 2010-2016, serta urutan secara horizontal yaitu dimulai dari nama kabupaten/kota, tahun, variabel Y, variabel  $X_1$  dan variabel  $X_2$ . Dikarenakan program *Eviews 9.0* tidak dapat membaca angka yang memiliki tanda koma (,), maka tanda tersebut diganti dengan tanda titik (.)
- 3) Buka program *Eviews*, kemudian *input* data yang sebelumnya telah disusun di *Ms. Excel*. Dikarenakan ada perbedaan satuan variabel, maka dilakukan log pada masing-masing data variabel.
- 4) Pemilihan model estimasi dilakukan dengan dua kali pengujian, yaitu uji *chow* dan uji *hausman*.
- 5) Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.
- 6) Jika telah dibandingkan antara hasil uji *chow* dan uji *hausman*, maka untuk melihat hasil regresi sebenarnya sudah terlihat sejak pemilihan efek spesifikasi.

Jika estimasi model yang terpilih, maka hasil uji t, nilai F, dan  $R^2$  dapat dibaca pada tabel yang telah dilakukan pengujian sebelumnya, misal yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*, maka hasilnya sudah terjawab sebelumnya. Besarnya koefisien masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dengan mengklik pada *cross-section Effect*.

### 3.7 Estimasi Regresi dengan Data Panel

Pemilihan estimasi model yang tepat yang akan digunakan dalam penelitian ini, dilakukan pengujian melalui tiga model, yaitu: *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

#### 3.7.1 *Pooled Least Square* (PLS)

Model ini juga dikenal dengan *Common Effect Model* (CEM). Model ini mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sebenarnya, nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama dengan slope koefisien dari variabel-variabel yang digunakan identik untuk semua *cross section*. Padahal setiap data pada masing-masing objek ialah berbeda, bahkan objek yang sama pun tetap berbeda antara satu waktu ke waktu yang lain. Model PLS tidak dapat menjawab perbedaan ini karena menganggap semua objek adalah sama, tetapi kondisi lapangan tidak demikian. Model PLS dapat ditulis sebagai berikut (Mukhlis dan Simanjuntak, 2017:38):

$$Y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta_i + \varepsilon_{it}(u_i=0)$$

Keterangan:

Y : variabel terikat

X : variabel bebas

$\varepsilon$  : *error term*

i : sebaran unit yang diamati

t : waktu pengamatan

$\alpha$  : besarnya konstanta

$\beta$  : besarnya koefisien variabel bebas

$u_i$  : residual

### 3.7.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini menggunakan variabel semu (*dummy*) untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya. Hal ini didasarkan pada kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain, Winarno (2015:9.15). Efek tetap di sini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Model FEM dapat ditulis sebagai berikut (Ekananda, 2015:389):

$$y_{it} = \beta'_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

*Intercept* adalah bagian dari  $X$  yang memiliki nilai 1. Estimasi terhadap nilai *intercept*  $\alpha_i$  berkorelasi dengan  $\varepsilon_{it}$ . Argumen ini menjelaskan bahwa metode efek tetap (*fixed*) diasumsikan  $\varepsilon_{it}$  memiliki korelasi dengan *regressor*  $x_{it}$ .

### 3.7.3 Random Effect Model (REM)

Metode ini merupakan terbalikan dari model FEM, yaitu estimasi pada data panel yang memungkinkan adanya hubungan antara waktu dan antar individu. REM memiliki  $\mu_i$  sebagai elemen *random* yang dapat menangkap karakteristik dari individu atau kelompok. Elemen random sebagai pemisah efek individu dari regressor terpisah dari  $\alpha$ , sehingga metode efek *random* diasumsikan  $\varepsilon_{it}$  tidak memiliki korelasi dengan *regressor*  $x_{it}$ .

Model REM dapat ditulis sebagai berikut (Ekananda, 2015:389):

$$y_{it} = \beta'_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Estimator REM selanjutnya memasukkan elemen  $(\mu_i + \varepsilon_{it})$  sebagai residu dalam struktur matriks  $\Sigma$ . Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) dalam literatur lain.

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan PLS dengan FEM terlebih dahulu. Apabila model PLS yang dinyatakan lebih baik, maka model tersebut yang akan dipakai dalam analisis data. Namun, jika model yang lebih

baik adalah FEM, maka model tersebut selanjutnya dibandingkan dengan REM. Berikut pengujian untuk menentukan model yang terbaik.

a. Uji *Chow*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik di antara PLS dan FEM. Pengujian ini dilakukan dengan uji *restricted F-Test* atau Uji Chow Test dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$  : Model mengikuti PLS

$H_1$  : Model mengikuti FEM

Penentuan model terbaik dengan memerhatikan hasil prob. Cross section F jika nilainya  $> 0,05$  (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi dan alpha), maka model yang terpilih adalah PLS. Jika nilainya  $< 0,05$  maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol, sehingga model yang akan digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji *Hausman*

Menurut Greene (dalam Ekananda 2015:389) menjelaskan bahwa perbedaan antara FEM dan REM yaitu pada posisi  $\alpha$  untuk menangkap keberagaman dari variabel dependen. Perbedaannya dapat dilihat dari:

- 1) Metode efek *random* diasumsikan  $\varepsilon_{it}$  tidak memiliki korelasi dengan *regressor*  $x_{it}$ .
- 2) Metode efek tetap (*fixed*) diasumsikan  $\varepsilon_{it}$  memiliki korelasi dengan *regressor*  $x_{it}$ .

Sebelum melakukan estimasi pemilihan model REM atau FEM, maka digunakan metode *rule of thumb* yang dibuat oleh Judge dkk (dalam Ekananda, 2015:389) dalam bukunya "*Introduction to the Theory and Practice of Econometrics*" yang menerangkan bahwa:

- a) Bila T besar sedangkan N kecil maka hasil *Fixed Effect* dan *Random Effect* tidak jauh berbeda. Pemilihan pada umumnya didasarkan pada kemudahan perhitungan, yaitu *Fixed Effect*.
- b) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Apabila diyakini bahwa N yang dipilih dalam penelitian diambil secara acak, maka *Random Effect* harus digunakan. Sebaliknya apabila

diyakini bahwa  $N$  yang dipilih dalam penelitian tidak diambil secara acak, maka *Fixed Effect* harus digunakan.

Koefisien hasil dari metode *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* akan berbeda karena perbedaan asumsi pada kedua metode tersebut. FEM menganggap varians *error* dari observasi satu dengan yang lainnya dianggap konstan, sedangkan pada REM diasumsikan berbeda. Akibatnya dapat terjadi perbedaan pengambilan keputusan ketika melihat signifikansi dari variabel-variabel independen yang terdapat dalam model. Model ekonometrika yang paling sering digunakan dan dianggap lebih baik daripada metode yang lain ketika menentukan FEM atau REM, yaitu dengan Uji Hausman. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model*

Pemilihan FEM atau REM dapat dilihat dari hasil prob. *Cross-section* random, jika nilainya  $> 0,05$  (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikan atau  $\alpha$ ), maka model yang terpilih *Random Effect Model*. Namun, jika nilainya  $< 0,05$  maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol dan menerima *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik.

### 3.8 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam analisis regresi mensyaratkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk menghasikan parameter yang valid. Apabila uji asumsi klasik yang dilakukan terpenuhi, maka OLS estimator dari  $\alpha$  dan  $\beta$  adalah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) Mukhlis dan Simanjuntak (2017:15). *Best* mengandung arti varian dari estimator OLS adalah minimal lebih kecil dari varian estimator yang lain. *Linier* memiliki arti bahwa apabila hubungannya tidak linier, maka metode OLS tidak dapat diterapkan. *Unbiased* memiliki arti bahwa nilai ekspektasi dari  $\alpha$  dan  $\beta$  sama dengan nilai sebenarnya yang menggambarkan hubungan antara  $X$  dan  $Y$ . Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pengujian, yaitu: uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

### 3.8.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar dua (atau lebih) variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang baik yaitu jika tidak adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat terjadi pada variabel data *time series*, sehingga dengan perpaduan dengan *cross section* dapat mengurangi terjadinya multikolinieritas. Multikolinieritas menyebabkan *standart error* koefisien regresi yang diduga akan besar, sehingga nilai t statistik menjadi kecil dan model tidak signifikan. Multikolinieritas terjadi karena nilai  $R^2$  kecil, semua nilai t variabel tidak signifikan, dan nilai F tinggi.

Adanya multikolinieritas dapat dideteksi dengan cara melihat nilai *R-squared* pada setiap variabel independen. Apabila nilai *R-squared* pada variabel independen lebih kecil daripada *R-squared* hasil regresi, maka data pada variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai *R-squared* pada variabel independen lebih besar daripada *R-squared* hasil regresi, maka data pada variabel independen terjadi multikolinieritas. Data yang baik apabila nilai korelasi antar variabel independen di bawah 0,8 (Gujarati, 2006:68).

### 3.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model persamaan yang baik apabila terjadi homoskedastisitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, salah satunya dengan melakukan Uji Glejser (Gujarati, 2006:93). Apabila nilai t-statistik > t-tabel atau nilai prob <  $\alpha = 5\%$ , maka ada heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika t-statistik < t-tabel atau nilai prob >  $\alpha = 5\%$ , maka tidak ada heteroskedastisitas.

### 3.9 Uji Signifikansi Statistik

Uji signifikansi merupakan sebuah prosedur yang dilakukan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol. Pengujian signifikansi dilatarbelakangi oleh pengujian statistik (estimator) dan distribusi sampling dari statistik yang dinyatakan hipotesis nol. Keputusan yang akan diambil mengenai untuk menerima ataupun menolak  $H_0$  didasarkan pada data yang ada. Uji signifikansi statistik terdiri dari tiga pengujian, yaitu uji signifikansi parameter parsial (t), uji signifikansi parameter simultan (F), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 3.9.1 Uji Signifikansi Parameter Parsial (t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara satu per satu (individual) dan menganggap variabel lain konstan.

$$t = \frac{\beta_1}{S(\beta_1)}$$

Keterangan:

- $t$  : pengujian secara parsial  
 $\beta_1$  : besarnya perubahan dari variabel bebas  
 $S(\beta_1)$  : *standart error* atau taksiran kesalahan

Hipotesis yang digunakan yaitu:

- a.  $H_0$  :  $b_1 = 0$  artinya, tidak ada pengaruh antara variabel PDRB dengan jumlah angka kemiskinan.  
 $H_1$  :  $b_1 < 0$  artinya, ada pengaruh negatif antara variabel PDRB dengan jumlah angka kemiskinan.
- b.  $H_0$  :  $b_2 = 0$  artinya, tidak ada pengaruh antara variabel IPM dengan angka kemiskinan.  
 $H_1$  :  $b_2 < 0$  artinya, ada pengaruh negatif antara variabel IPM dengan angka kemiskinan.

Apabila  $t$  hitung lebih kecil daripada  $t$  tabel dan  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai  $t$  hitung lebih

besar daripada t tabel dan  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_1$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.9.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen secara keseluruhan (simultan) memengaruhi variabel dependen atau tidak. Hipotesis yang digunakan yaitu:

- a.  $H_0 : b_1, b_2 = 0$ , artinya semua variabel independen tidak mampu memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.
- b.  $H_1 : b_1, b_2 \neq 0$ , artinya semua variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{1-R^2 / (N-1)}$$

Keterangan:

k : jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N : jumlah observasi

Kriteria pengujian yang digunakan pada tingkat signifikansi 5% sebagai berikut:

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

Namun, untuk mempermudah membaca *output* dapat dilakukan dengan melihat perbandingan nilai *Probability* atau *P-value*. Jika nilainya kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Demikian sebaliknya, jika nilai *Probability* lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### 3.9.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel dapat menjelaskan variabel dependennya. Semakin tinggi nilai  $R^2$  (mendekati 100%), maka semakin tinggi kemampuan model untuk menjelaskan variabel

dependen. Nilai  $R^2$  yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model  $0 < R^2 < 1$ , sehingga kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

- a. Nilai  $R^2$  yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
- b. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu, berarti kemampuan-kemampuan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

*Adjusted R-squared* merupakan besarnya pengaruh atau kemampuan variabel bebas secara simultan dalam menjelaskan variabel terikat dengan memerhatikan standar *error*. Penjelaskannya sama dengan *R-squared*, akan tetapi nilai ini telah terkoreksi dengan standar *error*. Jadi, besarnya pengaruh dilihat dari nilai *Adjusted R-squared* pada *output* hasil pengujian data panel.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Nilai *R-squared* pada penelitian ini sebesar 0,978506 yang menunjukkan bahwa variabel bebas sangat kuat dalam menjelaskan variabel terikat. Besarnya pengaruh produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 sebesar 97,4797%. Indeks pembangunan manusia lebih dominan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 yakni sebesar -1,868236 dan besarnya pengaruh produk domestik regional bruto terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 sebesar -0,251899. Nilai PDRB tertinggi pada tahun 2016 disumbangkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 29,24%, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobi dan sepeda motor sebesar 18,29%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,71%, dan sisanya sebesar 40,76% disumbangkan oleh 14 sektor PDRB lainnya. PDRB tertinggi disumbangkan oleh Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Malang. PDRB terendah yaitu Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Nilai IPM tertinggi yaitu Kota Surabaya dan terendah Kabupaten Sampang. Angka kemiskinan terendah yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya, sedangkan angka kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Sampang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hendaknya lebih mempertimbangkan kualitas pembangunan manusia daripada sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata. Program pendidikan untuk wajib belajar selama sembilan tahun bagi masyarakat untuk lebih diaktifkan kembali, khususnya di daerah yang tingkat pendidikannya rendah, seperti Kabupaten Sampang. Pemerataan jumlah guru yang saat ini mayoritas berada di daerah perkotaan, sebaiknya dialihkan ke daerah perdesaan, agar tersedianya pendidikan di daerah tersebut akan sama dengan di daerah perkotaan, seperti program SM3T yang memfokuskan guru mengajar di daerah pelosok, sehingga pendidikan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.
- b. Sektor lapangan usaha yang paling banyak menyumbang terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur yaitu dari sektor industri pengolahan. Sektor tersebut banyak berkembang di daerah perkotaan, seperti Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro, sehingga kabupaten/kota tersebut dapat dijadikan sebagai *centre* dari kota industri.
- c. Bagi peneliti lain, hendaknya mempertimbangkan sumbangan pengaruh variabel dalam penelitian ini, sehingga dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain di luar penelitian ini, seperti: struktur ekonomi, pola distribusi pendapatan, ketersediaan sumber daya alam, penguasaan teknologi, dan keseriusan pemerintah memerangi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arsyad, L. 2016. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPF.
- BPS. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- BPPD Kota Blitar. 2016. *Statistik Kota Blitar 2016*. Blitar: Bappeda Kota Blitar.
- BPPD DIY. 2015. *Laporan Akhir Analisis Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BPPD DIY.
- BPS. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: BPS Pusat.
- BRS Kota Surabaya. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya Tahun 2017*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- Ekananda, M. 2015. *Ekonometrika Dasar (untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gujarati, D. N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika (Edisi Ketiga Jilid 2)*. Jakarta: Erlangga.
- Jhingan, M. L. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Khomsan, A. dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawan, D. 2008. *Tabel Distribusi (Dilengkapi Metode untuk Membaca Tabel Distribusi)*. Jakarta: Forum Statistika.

Mukhlis, I. dan T. H. Simanjuntak. 2017. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Tulungagung: Cahaya Abadi.

Isdijoso, W., A. Suryahadi., dan Akhmadi. 2016. *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. Jakarta: The SMERU Research Institute

Sukirno, S. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Sun'an, M. dan A. Senuk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Tambunan, T. T. 2015. *Perekonomian Indonesia (Era Orde Lama Hingga Jokowi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tambunan, T. T. 2016. *Pembangunan Ekonomi Inklusif (Sudah Sejauh Mana Indonesia?)*. Jakarta: LP3S.

Tarigan, R. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi (Edisi kesebelas Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga.

Winarno, W. W. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews (Edisi 4)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

### **Jurnal**

Alhudori, M. 2017. Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *Jurnal of Economics and Business*. 1(1): 113-124.

Bintang, A. B. dan N. Woyanti. 2018. Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi dan Manajemen*. 33(1): 20-28.

Fadlilah, N., Sukiman, dan A. S. Dewi. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2009-2013. *Jurnal Eko-Regional*. 11(1): 18-26.

Susanti, S. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*. 9(1):1-18.

Kotambunan, L., S. W. Palar dan R. L. Tumilaar. 2016. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (dalam tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(01): 925-933.

Meriyanti, N. K. (2015). Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengentasan kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha*. 5(1): - .

### **Prosiding**

Anindita, A. dan M. Utami. 2017. Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran, dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global"* (hal. 130-137). Malang: FEB Unikama.

### **Internet**

Basri, A. 2018. Angka Kemiskinan Sampang Tertinggi di Jawa Timur. <https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/01/17/40994/angka-kemiskinan-sampang-tertinggi-di-jawa-timur>. [Diakses pada 30 Juli 2018].

- BPS Kabupaten Sampang. 2017. *Data Sampang (Metode Baru)*. <http://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3527>. [Diakses pada 24 Juli 2018].
- BPS Kabupaten Pasuruan. 2017. *Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2003-2016 (Rp/Kapita/Bulan)*. [https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/10/27/243/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2003-2016--rp-kapita-bln-.html](https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/10/27/243/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2003-2016-<u>-rp-kapita-bln-.html</u>). [Diakses pada 31 Juli 2018].
- BPS Kabupaten Pasuruan. 2017. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2002-2016 (%)*. <https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/10/27/242/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2002-2016.html>. [Diakses pada 31 Juli 2018].
- BPS Kota Surabaya. 2017. *PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2016 (Juta Rupiah)*. <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2017/07/05/542/pdrb-kota-surabaya-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-2010-2016-juta-rupiah-.html>. [Diakses pada 23 Juli 2018].
- BPS Kota Surabaya. 2018. *Proyeksi Penduduk Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2016*. <https://surabayakota.bps.go.id/dynamictable/2018/04/18/20/proyeksi-penduduk-kota-surabaya-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-tahun-2016.html>. [Diakses pada 23 Juli 2018].
- BPS Provinsi Jawa Barat. 2018. *Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat, 2010-2016*. <https://jabar.bps.go.id/dynamictable/2016/10/06/15/proyeksi-jumlah-penduduk-provinsi-jawa-barat-2010-2016.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*. <http://ipm.bps.go.id/page/ipm>. [Diakses pada 18 Mei 2018].

- BPS Provinsi Jawa Timur. 2017. *Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2016*.  
<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/09/05/60/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2016.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2017. *PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Milyar Rupiah)*.  
<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/35/pdrb-provinsi-jawa-timur-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-milyar-rupiah-.html>. [Diakses pada 15 Agustus 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2017. *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2002-2016 (%)*.  
<https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/10/27/242/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2002-2016.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota (IPM Metode Baru), 2010-2016*.  
<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/394/angka-harapan-hidup-ahh-penduduk-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2010-2017-metode-baru-.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Angka Harapan Sekolah (AHS) Penduduk Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota (IPM Metode Baru), 2010-2016*.  
<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/399/angka-harapan-sekolah-ahs-penduduk-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-ipm-metode-baru-2010-2017.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2017*.  
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2017.html>. [Diakses pada 15 Agustus 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Konsep IPM*.  
<https://jatim.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>. [Diakses pada 18 Mei 2018].

- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Konsep Kemiskinan*.  
<https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1>.  
[Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016*.  
<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/224/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html>.  
[Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (IPM Metode Baru), 2010-2016*.  
<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/02/06/325/pengeluaran-per-kapita-per-tahun-yang-disesuaikan-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-ipm-metode-baru-2010-2016.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017*.  
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/758/perkembangan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012-2017.html>. [Diakses pada 30 Juli 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*.  
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18%2000:00:00/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2017.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. *Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota (IPM Metode Baru), 2010-2016*.  
<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/09/22/103/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-ipm-metode-baru-2010-2016.html>. [Diakses pada 18 Mei 2018].
- BPS Pusat. 2018. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*.  
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2017.html>. [Diakses pada 07 Juli 2018].

BPS Pusat. 2018. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2017.html>. [Diakses pada 07 Juli 2018].

Jusuf, J. 2016. *Jawa Timur Potensi Besar di Sektor Pangan*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3302797/jawa-timur-potensi-besar-di-sektor-pangan>. [Diakses pada 07 Juli 2018].

Tanjung, F. 2017. *Angka Kemiskinan Turun, Pengeluaran Per Kapita Naik*. <http://www.radarmalang.id/angka-kemiskinan-turun-pengeluaran-per-kapita-naik/>. [Diakses pada 30 Juli 2018].

Zabidi. 2017. *UNDP 2016, Posisi Indeks Pembangunan Indonesia 113 dari 188 Negara*. <https://www.kompasiana.com/khalidzabidi/5a0bf3e18325cc59eb7c7312/un-dp-2016-posisi-indeks-pembangunan-indonesia-113-dari-188-negara>. [Diakses pada 07 Juli 2018].



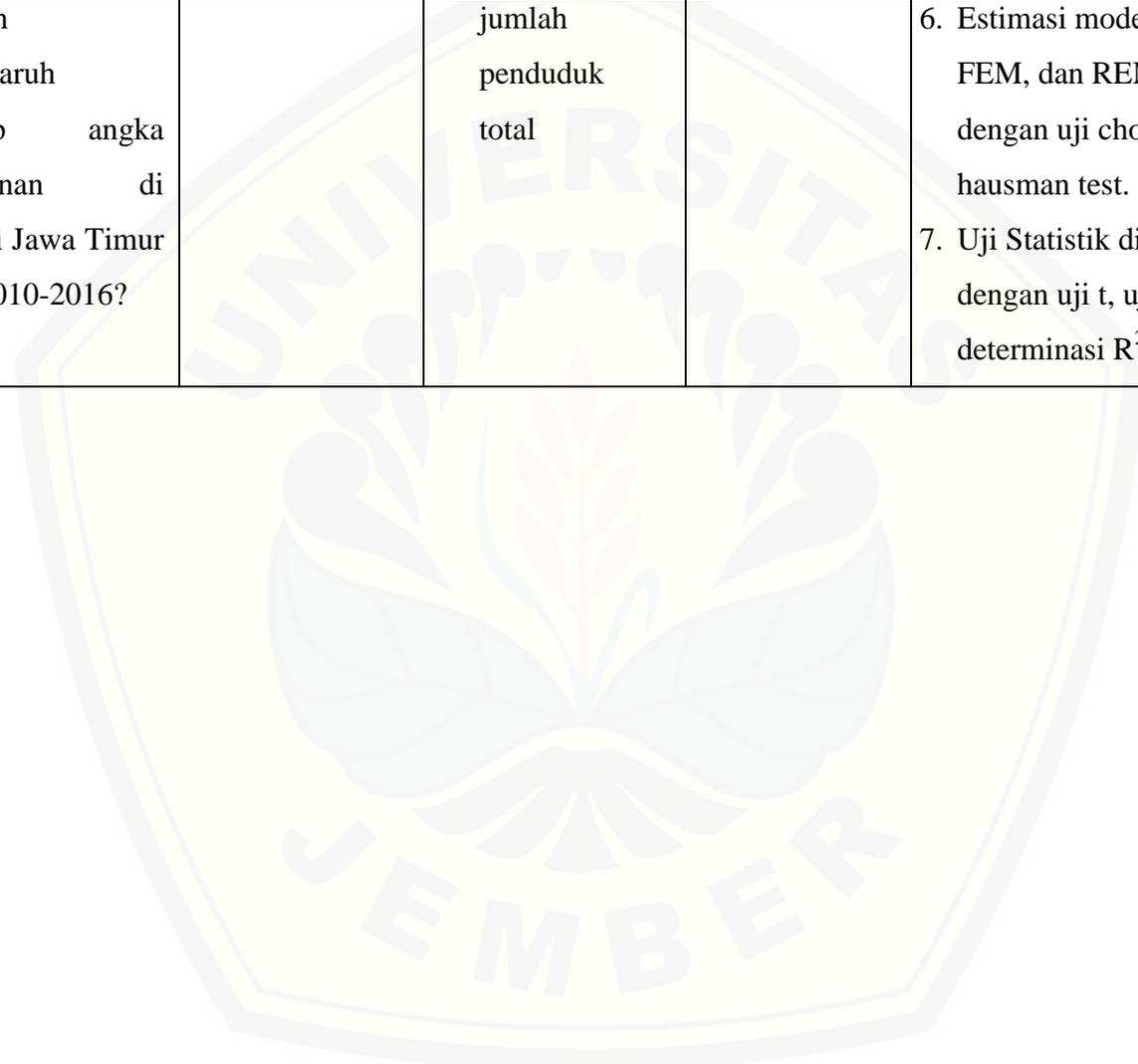
**LAMPIRAN**

Lampiran 1 Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010-2016	<p>1) Apakah ada pengaruh signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016?</p> <p>2) Manakah di antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih</p>	<p>1. Variabel bebas (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk Domestik Regional Bruto</li> <li>- Indeks Pembangunan Manusia</li> </ul> <p>2. Variabel Terikat (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka Kemiskinan</li> </ul>	<p>PDRB ADHK 2010:</p> <p>1) Pendekatan produksi</p> <p>IPM:</p> <p>1) Umur panjang dan hidup sehat</p> <p>2) Pendidikan</p> <p>3) Standar hidup layak</p> <p>Angka Kemiskinan:</p> <p>1) Persentase penduduk miskin terhadap</p>	<p>Data BPS Jawa Timur tahun 2010-2016 mengenai PDRB, IPM, dan angka kemiskinan tiap kabupaten/kota</p>	<p>1. Jenis penelitian kuantitatif <i>eksplanatory</i></p> <p>2. Tempat penelitian yaitu Provinsi Jawa Timur</p> <p>3. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen (data sekunder) dari BPS Jawa Timur dan wawancara kepada pihak BPS Jawa Timur</p> <p>4. Metode analisis data menggunakan data panel (penggabungan <i>cross section</i> dan <i>times series</i>).</p> <p>5. Uji asumsi klasik: uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.</p>	<p>1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010-2016</p> <p>2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih dominan berpengaruh daripada Produk Domestik Regional</p>



Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis
	dominan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016?		jumlah penduduk total		<p>6. Estimasi model yaitu: PLS, FEM, dan REM. Dilakukan dengan uji chow test dan hausman test.</p> <p>7. Uji Statistik dilakukan dengan uji t, uji F, dan determinasi <math>R^2</math>.</p>	Bruto (PDRB) terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016



Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama narasumber :  
Umur (tahun) :  
Jabatan :

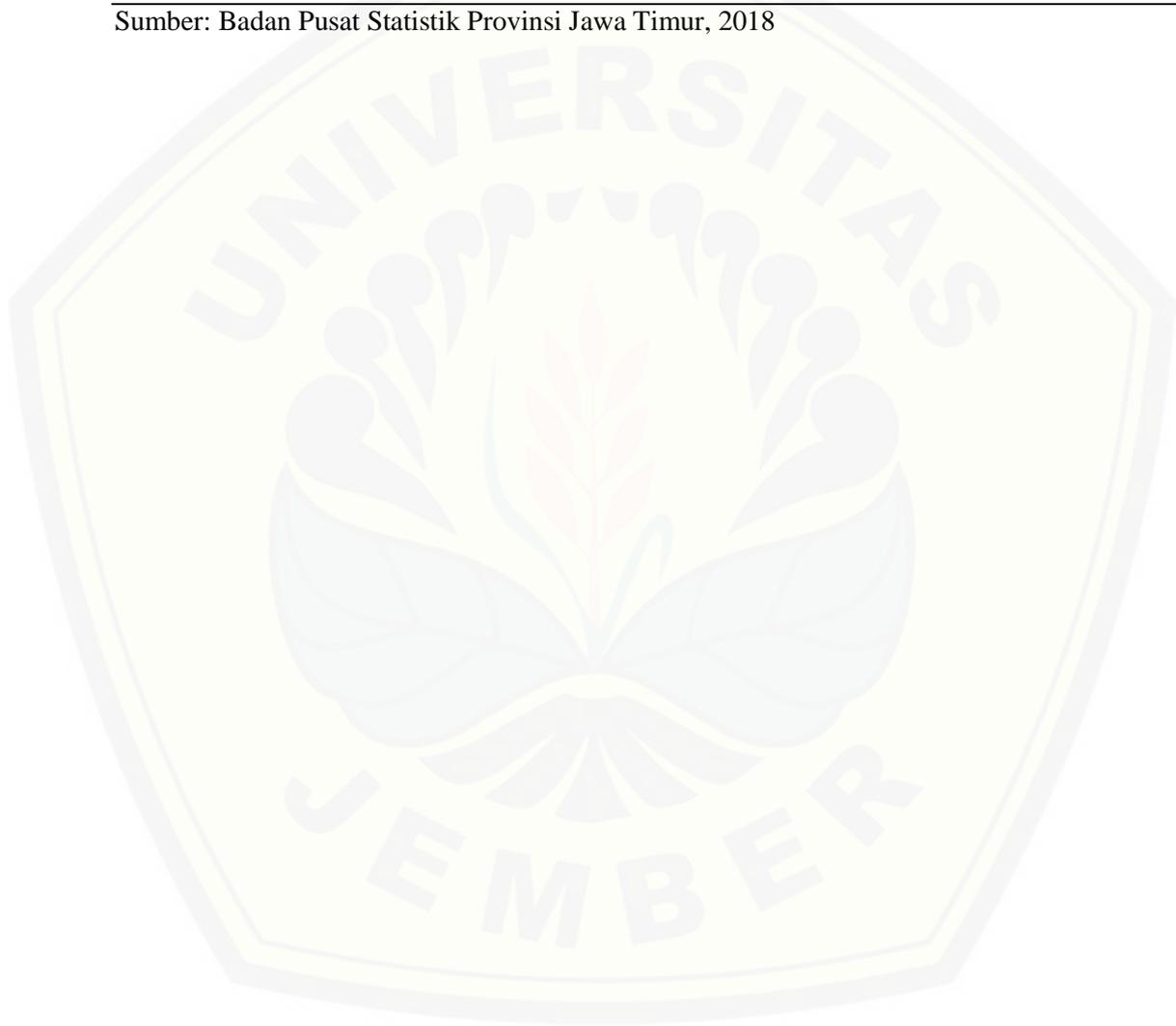
1. Bagaimana peran PDRB dan IPM untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana konsep perhitungan PDRB untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur?
3. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam perhitungan PDRB di Jawa Timur?
4. Mengapa perhitungan PDRB didasarkan pada tahun dasar 2010?
5. Bagaimana konsep perhitungan IPM untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur?
6. Bagaimana menentukan tolak ukur perhitungan IPM?
7. Bagaimana menentukan standar perhitungan angka kemiskinan di Jawa timur?
8. Berapa sumbangsih kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB terbesar terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur?
9. Berapa sumbangsih kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM terbesar terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur?
10. Bagaimana kondisi kabupaten/kota dengan nilai PDRB dan IPM terbesar di Jawa Timur?

Lampiran 3 PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah) per Kabupaten/Kota di Provinsi  
Jawa Timur

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pacitan	6817.40	7246.20	7705	8157.60	8582.20	9019.50	9489.10
Ponorogo	8961.50	9472.20	10038.40	10554.50	11104.50	11687.90	12305.70
Trenggalek	7962.10	8435.20	8959.50	9496.70	9998.50	10501.60	11026.50
Tulungagung	16776.30	17845.20	18999	20164.30	21265.20	22326.60	23446.40
Blitar	16213.90	17093.90	18054.50	18967.30	19920.20	20925.50	21991.40
Kediri	18254.50	19354.90	20538.30	21733.50	22890	24007.70	25211.90
Malang	41342.90	44091.30	47076	49571.70	52550.40	55317.80	58247.30
Lumajang	14260.10	15144.40	16053.40	16949.60	17851.90	18676.90	19555.20
Jember	33375.50	35208.20	37262	39519.20	41971.70	44222.60	46526.60
Banyuwangi	32463.80	34720.40	37235.70	39733.60	42005.70	44529.90	46924.60
Bondowoso	8515.90	9033	9583.40	10140.10	10652.40	11179.60	11735.60
Situbondo	8471.40	8927.10	9411.60	9993.80	10572.40	11086.50	11640.80
Probolinggo	15028.10	15912.50	16936.80	17808.90	18682.20	19571	20504.10
Pasuruan	61178.30	65271.60	70167.10	75044	80105.40	84415.70	89011.20
Sidoarjo	81472.70	87212.40	93543.90	99992.50	106434.30	112012.90	118179.20
Mojokerto	34147.10	36405.80	39047.30	41608.40	44292	46792.30	49321.90
Jombang	17350.80	18385	19514.80	20672.30	21793.20	22960.20	24199.10
Nganjuk	11405.40	12061.20	12767	13456	14142.90	14875.40	15661.80
Madiun	8119.70	8608.70	9135.70	9654.10	10169.70	10704.90	11268.90
Magetan	8277.80	8744.80	9251.20	9792.60	10291.70	10823.90	11398.10
Ngawi	8456.70	8973.30	9568.20	10094	10681	11223.10	11807.60
Bojonegoro	33291.90	36751	38136.10	39039.40	39934.80	46892.80	57187.40
Taban	28017.90	29934.30	31816.30	33678.80	35519.90	37256	39081.80
Lamongan	16275.20	17360.50	18562.70	19848.80	21099.90	22316.90	23623.80
Gresik	59068.60	62898.70	67248.80	71314.20	76336	81360.40	85835.10
Bangkalan	15881.40	16406.50	16173.70	16204	17369.20	16906.80	17018.60
Sampang	10064	10315.30	10910.90	11623.80	11632.90	11874.50	12606.80
Pamekasan	6994.20	7429.40	7894	8375.20	8846.20	9316.90	9815.80
Sumenep	15136.50	16064.80	17665	20218.10	21476.90	21750.60	22311.70
Kota Kediri	57550.60	60020.10	63185.10	65408.80	69232.90	72945.50	76959.40
Kota Blitar	2855	3038.40	3236.60	3446.80	3649.60	3856.90	4079.30
Kota Malang	31377.30	33273.70	35355.70	37547.70	39724.70	41952.10	44303.90
Kota Probolinggo	4921.30	5213.90	5552.10	5911.30	6261.90	6628.80	7018.30
Kota Pasuruan	3585.40	3810.70	4051.20	4315.10	4561.30	4813.30	5076.40

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Mojokerto	2987.20	3165.60	3358.40	3566.70	3774.60	3991.40	4221.50
Kota Madiun	6081.20	6494.40	6937.70	7470.70	7965.30	8455.40	8954.70
Kota Surabaya	231204.70	247686.60	265892.10	286050.70	305947.60	324215.20	343652.60
Kota Batu	6504.40	6968	7473.60	8018.60	8572.10	9145.90	9750.90
Total 38 Kab/Kota	990648.80	1054978.80	1124298.80	1195143.50	1267863.30	1340541	1420950.80
<b>Jawa Timur</b>	<b>990648.80</b>	<b>1054401.80</b>	<b>1124464.60</b>	<b>1192789.80</b>	<b>1262684.50</b>	<b>1331395</b>	<b>1405236.10</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018



Lampiran 4 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Kategori PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133504.56	138870.09	146002.57	150463.72	155783.96	160907.33	164687.46
Pertambangan dan Penggalian	54020.53	58140.33	58287.95	59049.99	60862.35	65707.01	75024.89
Industri Pengolahan	292708.39	306072.36	326681.77	345794.56	372316.29	393272.95	411028.39
Pengadaan Listrik dan Gas	4491.98	4404.97	4259.04	4380.34	4545.12	4455.27	4483.93
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1075.88	1171.31	1182.01	1231.05	1234.13	1299.27	1366.77
Konstruksi	89693.03	95157.73	102250.92	110485.45	116498.23	120688.27	126802.99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	174755.50	190771.67	206433.67	219246.07	230225.81	243014.66	257126.66
Transportasi dan Pergudangan	27082.43	29399.87	31528.72	34241.21	36461.76	38896.63	41107.64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47096.42	51667.02	54601.23	57684.94	62807.80	67657.04	73398.14
Informasi dan Komunikasi	47548.21	51881.62	58299.18	65313.95	69155.10	73639.96	79216.96
Jasa Keuangan dan Asuransi	22070.51	24088.32	26668.02	30348.35	32399.64	34730.26	37158.62
Real Estate	16306.30	17737.71	19153.83	20565.06	21998.29	23092.64	24298.54
Jasa Perusahaan	7774.01	8156.66	8416.88	9044.15	9815	10349.05	10884.70

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

Lampiran 5 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Wilayah	IPM						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Pacitan	61.14	62.03	62.94	63.38	63.81	64.92	65.74
Kabupaten Ponorogo	64.13	65.28	66.16	67.03	67.40	68.16	68.93
Kabupaten Trenggalek	63.67	64.27	65.01	65.76	66.16	67.25	67.78
Kabupaten Tulungagung	67.28	67.76	68.29	69.30	69.49	70.07	70.82
Kabupaten Blitar	64.79	65.47	66.17	66.49	66.88	68.13	68.88
Kabupaten Kediri	66.24	66.84	67.29	68.01	68.44	68.91	69.87
Kabupaten Malang	63.47	63.97	64.71	65.20	65.59	66.63	67.51
Kabupaten Lumajang	59.62	60.72	61.31	61.87	62.33	63.02	63.74
Kabupaten Jember	59.94	60.64	61.31	62.43	62.64	63.04	64.01
Kabupaten Banyuwangi	64.54	65.48	66.12	66.74	67.31	68.08	69
Kabupaten Bondowoso	59.47	60.46	62.24	63.21	63.43	63.95	64.52
Kabupaten Situbondo	60.07	60.82	62.23	63.43	63.91	64.53	65.08
Kabupaten Probolinggo	59.83	60.30	61.33	62.61	63.04	63.83	64.12
Kabupaten Pasuruan	60.79	61.43	62.31	63.74	64.35	65.04	65.71
Kabupaten Sidoarjo	73.75	74.48	75.14	76.39	76.78	77.43	78.17
Kabupaten Mojokerto	68.14	68.71	69.17	69.84	70.22	70.85	71.38
Kabupaten Jombang	66.20	66.84	67.82	68.63	69.07	69.59	70.03
Kabupaten Nganjuk	65.60	66.58	68.07	68.98	69.59	69.90	70.50
Kabupaten Madiun	64.87	65.98	67.32	68.07	68.60	69.39	69.67
Kabupaten Magetan	67.58	68.52	69.56	69.86	70.29	71.39	71.94
Kabupaten Ngawi	64.52	65.84	66.72	67.25	67.78	68.32	68.96
Kabupaten Bojonegoro	62.19	63.22	64.20	64.85	65.27	66.17	66.73
Kabupaten Tuban	61.33	62.47	63.36	64.14	64.58	65.52	66.19
Kabupaten Lamongan	65.40	66.21	67.51	68.90	69.42	69.84	70.34
Kabupaten Gresik	69.90	71.11	72.12	72.47	72.84	73.57	74.46
Kabupaten Bangkalan	57.23	58.63	59.65	60.19	60.71	61.49	62.06
Kabupaten Sampang	54.49	55.17	55.78	56.45	56.98	58.18	59.09
Kabupaten Pamekasan	59.37	60.42	61.21	62.27	62.66	63.10	63.98
Kabupaten Sumenep	57.27	58.70	60.08	60.84	61.43	62.38	63.42
Kota Kediri	72.20	72.93	73.66	74.18	74.62	75.67	76.33
Kota Blitar	72.56	73.08	73.53	74.53	75.26	76	76.71
Kota Malang	76.69	77.36	78.04	78.44	78.96	80.05	80.46
Kota Probolinggo	67.30	68.14	68.93	70.05	70.49	71.01	71.50
Kota Pasuruan	69.69	70.41	72.01	72.89	73.23	73.78	74.11
Kota Mojokerto	72.78	73.47	74.20	74.91	75.04	75.54	76.38
Kota Madiun	75.98	76.48	77.21	78.41	78.81	79.48	80.01

Wilayah	IPM						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Surabaya	77.20	77.62	78.05	78.51	78.87	79.47	80.38
Kota Batu	68.66	69.76	70.62	71.55	71.89	72.62	73.57
Jawa Timur	<b>65.36</b>	<b>66.06</b>	<b>66.74</b>	<b>67.55</b>	<b>68.14</b>	<b>68.95</b>	<b>69.74</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018



Lampiran 6 AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Wilayah	Angka Harapan Hidup (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Jawa Timur</b>	<b>69.60</b>	<b>70.02</b>	<b>70.14</b>	<b>70.34</b>	<b>70.45</b>	<b>70.68</b>	<b>70.74</b>
Kabupaten Pacitan	71.26	70.51	70.61	70.70	70.75	71.05	71.18
Kabupaten Ponorogo	69.93	71.70	71.78	71.85	71.88	72.08	72.18
Kabupaten Trenggalek	71.62	72.38	72.44	72.49	72.51	72.91	73.03
Kabupaten Tulungagung	71.48	72.77	72.82	72.86	72.88	73.28	73.40
Kabupaten Blitar	70.88	72.36	72.42	72.47	72.50	72.80	72.89
Kabupaten Kediri	69.66	71.92	71.97	72.02	72.04	72.14	72.20
Kabupaten Malang	68.96	71.67	71.72	71.76	71.78	71.98	72.05
Kabupaten Lumajang	67.17	68.81	68.92	69.02	69.07	69.27	69.38
Kabupaten Jember	62.84	67.54	67.65	67.75	67.80	68.20	68.37
Kabupaten Banyuwangi	67.58	69.70	69.79	69.88	69.93	70.03	70.11
Kabupaten Bondowoso	63.23	65.08	65.22	65.36	65.43	65.73	65.89
Kabupaten Situbondo	63.19	67.83	67.93	68.03	68.08	68.28	68.41
Kabupaten Probolinggo	61.13	65.47	65.58	65.69	65.75	66.15	66.31
Kabupaten Pasuruan	64.01	69.70	69.75	69.80	69.83	69.83	69.86
Kabupaten Sidoarjo	70.55	73.42	73.43	73.43	73.43	73.63	73.67
Kabupaten Mojokerto	70.19	71.69	71.72	71.75	71.76	71.96	72.03
Kabupaten Jombang	70.09	71.22	71.28	71.34	71.37	71.67	71.77
Kabupaten Nganjuk	68.89	70.68	70.76	70.83	70.87	70.97	71.04
Kabupaten Madiun	68.90	69.49	69.59	69.70	69.76	70.36	70.55
Kabupaten Magetan	71.17	71.71	71.79	71.87	71.91	72.01	72.09
Kabupaten Ngawi	69.91	71.10	71.19	71.28	71.33	71.53	71.63
Kabupaten Bojonegoro	67.15	69.89	69.98	70.07	70.11	70.51	70.67
Kabupaten Tuban	67.78	70.07	70.15	70.22	70.25	70.55	70.67
Kabupaten Lamongan	68.20	71.26	71.35	71.43	71.47	71.67	71.77
Kabupaten Gresik	70.98	72.16	72.18	72.19	72.20	72.30	72.33
Kabupaten Bangkalan	63.32	69.51	69.56	69.60	69.62	69.72	69.77
Kabupaten Sampang	63	67.40	67.43	67.46	67.48	67.58	67.62
Kabupaten Pamekasan	63.99	66.43	66.48	66.53	66.56	66.86	66.95
Kabupaten Sumenep	64.71	69.81	69.90	69.98	70.02	70.42	70.56
Kota Kediri	70.41	73.46	73.49	73.51	73.52	73.62	73.65
Kota Blitar	72.23	72.63	72.66	72.69	72.70	73	73.09
Kota Malang	70.32	72.21	72.25	72.28	72.30	72.60	72.68
Kota Probolinggo	70.17	69.41	69.46	69.50	69.52	69.72	69.79
Kota Pasuruan	66.37	70.44	70.48	70.52	70.54	70.84	70.93
Kota Mojokerto	71.56	72.30	72.33	72.37	72.39	72.69	72.78
Kota Madiun	71.01	72.27	72.33	72.38	72.41	72.41	72.44
Kota Surabaya	71.01	73.78	73.80	73.83	73.85	73.85	73.87
Kota Batu	69.44	71.99	72.02	72.05	72.06	72.16	72.20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

Lampiran 7 AHS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Wilayah	Angka Harapan Sekolah (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Jawa Timur</b>	<b>11.49</b>	<b>11.62</b>	<b>11.74</b>	<b>12.17</b>	<b>12.45</b>	<b>12.66</b>	<b>12.98</b>
Kabupaten Pacitan	11.01	11.03	11.35	11.41	11.61	11.94	12.19
Kabupaten Ponorogo	12.10	12.33	12.56	12.80	13.04	13.29	13.69
Kabupaten Trenggalek	11.13	11.17	11.22	11.49	11.64	12.08	12.09
Kabupaten Tulungagung	11.75	11.84	11.93	12.58	12.72	12.73	13.03
Kabupaten Blitar	11.03	11.18	11.34	11.37	11.49	11.98	12.42
Kabupaten Kediri	11.37	11.54	11.57	11.85	12.01	12.15	12.57
Kabupaten Malang	10.71	10.78	10.87	11.02	11.25	11.98	12.28
Kabupaten Lumajang	10.49	10.71	10.71	10.94	11.12	11.61	11.77
Kabupaten Jember	10.87	10.99	11.11	11.87	12	12.01	12.31
Kabupaten Banyuwangi	11.04	11.22	11.25	11.39	11.81	12.20	12.55
Kabupaten Bondowoso	11.27	11.72	12.42	12.76	12.85	12.86	12.87
Kabupaten Situbondo	11.50	11.54	12.20	12.90	12.97	12.98	12.99
Kabupaten Probolinggo	10.37	10.40	10.91	11.32	11.60	12.04	12.05
Kabupaten Pasuruan	10.45	10.59	10.73	11.63	11.78	11.80	11.81
Kabupaten Sidoarjo	12.37	12.42	12.54	13.25	13.55	13.89	14.13
Kabupaten Mojokerto	11.69	11.75	11.81	11.86	11.97	12.18	12.44
Kabupaten Jombang	11.33	11.54	11.92	12.43	12.65	12.68	12.69
Kabupaten Nganjuk	10.84	11.15	11.77	12.34	12.65	12.68	12.82
Kabupaten Madiun	11.59	11.65	12.06	12.53	12.79	13.10	13.11
Kabupaten Magetan	12.40	12.42	12.54	12.57	12.77	13.60	13.71
Kabupaten Ngawi	11.43	11.73	11.96	12.18	12.29	12.31	12.65
Kabupaten Bojonegoro	11.14	11.43	11.74	12.04	12.08	12.09	12.11
Kabupaten Tuban	10.47	10.91	11.02	11.13	11.42	12.07	12.17
Kabupaten Lamongan	11.79	11.88	12.34	13.22	13.41	13.43	13.44
Kabupaten Gresik	11.89	12.23	12.63	12.85	13.17	13.19	13.69
Kabupaten Bangkalan	10.16	10.56	10.67	10.96	11.17	11.55	11.56
Kabupaten Sampang	9.78	9.82	9.86	10.20	10.39	11.09	11.37
Kabupaten Pamekasan	12.34	12.52	12.70	13.05	13.32	13.34	13.35
Kabupaten Sumenep	11.58	11.59	12.01	12.18	12.39	12.41	12.73
Kota Kediri	12.72	12.90	13.09	13.27	13.52	14.30	14.61
Kota Blitar	12.13	12.28	12.29	13.15	13.51	13.53	14
Kota Malang	13.41	13.71	14.01	14.16	14.47	15.23	15.38
Kota Probolinggo	11.91	12.16	12.42	12.97	13.29	13.32	13.54
Kota Pasuruan	11.86	11.94	12.87	13.29	13.53	13.56	13.57
Kota Mojokerto	12.46	12.72	12.98	13.24	13.30	13.33	13.80

Wilayah	Angka Harapan Sekolah (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Madiun	12.42	12.44	12.56	13.33	13.64	14.06	14.19
Kota Surabaya	12.88	12.96	13.05	13.13	13.44	13.52	13.99
Kota Batu	12.60	12.64	12.67	12.71	12.90	13.16	13.62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018



Lampiran 8 RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Jawa Timur</b>	<b>6.73</b>	<b>6.79</b>	<b>6.85</b>	<b>6.90</b>	<b>7.05</b>	<b>7.14</b>	<b>7.23</b>
Kabupaten Pacitan	6	6.10	6.21	6.32	6.43	6.88	6.89
Kabupaten Ponorogo	6.12	6.45	6.57	6.86	6.91	6.96	6.97
Kabupaten Trenggalek	6.32	6.36	6.55	6.74	6.87	7.18	7.19
Kabupaten Tulungagung	7.34	7.37	7.41	7.44	7.45	7.72	7.73
Kabupaten Blitar	6.43	6.52	6.59	6.67	6.82	7.24	7.25
Kabupaten Kediri	7.03	7.06	7.08	7.24	7.41	7.41	7.58
Kabupaten Malang	6.34	6.35	6.51	6.59	6.66	6.73	6.98
Kabupaten Lumajang	5.46	5.69	5.78	5.88	6.03	6.04	6.05
Kabupaten Jember	5.49	5.53	5.58	5.62	5.63	5.76	6.05
Kabupaten Banyuwangi	6.38	6.53	6.68	6.84	6.87	6.88	6.93
Kabupaten Bondowoso	4.97	4.97	5.31	5.48	5.52	5.53	5.54
Kabupaten Situbondo	4.91	5.04	5.16	5.28	5.54	5.67	5.68
Kabupaten Probolinggo	5.11	5.13	5.16	5.61	5.64	5.66	5.67
Kabupaten Pasuruan	5.83	5.85	5.96	6.08	6.36	6.50	6.58
Kabupaten Sidoarjo	9.22	9.50	9.70	10.03	10.09	10.10	10.22
Kabupaten Mojokerto	7.22	7.26	7.30	7.57	7.74	7.75	7.76
Kabupaten Jombang	7.26	7.28	7.37	7.40	7.52	7.59	7.68
Kabupaten Nganjuk	6.71	6.83	7	7.15	7.31	7.33	7.34
Kabupaten Madiun	6.13	6.43	6.74	6.74	6.89	6.99	7
Kabupaten Magetan	7.12	7.23	7.33	7.43	7.55	7.65	7.66
Kabupaten Ngawi	5.82	6.19	6.23	6.27	6.52	6.53	6.54
Kabupaten Bojonegoro	5.51	5.70	5.80	5.90	6.14	6.64	6.65
Kabupaten Tuban	5.58	5.61	5.82	6.14	6.18	6.20	6.25
Kabupaten Lamongan	6.48	6.63	6.84	7.06	7.27	7.28	7.29
Kabupaten Gresik	7.93	8.26	8.41	8.41	8.42	8.93	8.94
Kabupaten Bangkalan	4.29	4.59	4.89	4.90	5.07	5.08	5.13
Kabupaten Sampang	3.14	3.20	3.27	3.34	3.49	3.65	3.79
Kabupaten Pamekasan	5.11	5.30	5.36	5.68	5.72	5.73	6.08
Kabupaten Sumenep	4.20	4.21	4.48	4.58	4.77	4.89	5.08
Kota Kediri	9.18	9.34	9.49	9.57	9.70	9.88	9.89
Kota Blitar	9.47	9.51	9.52	9.53	9.81	9.87	9.88
Kota Malang	9.38	9.52	9.67	9.82	9.97	10.13	10.14
Kota Probolinggo	8.17	8.17	8.17	8.42	8.44	8.46	8.47
Kota Pasuruan	8.59	8.74	8.88	9.03	9.06	9.07	9.08
Kota Mojokerto	9.79	9.83	9.87	9.91	9.91	9.92	9.93

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Madiun	10.32	10.50	10.68	10.86	10.90	11.08	11.09
Kota Surabaya	9.76	9.85	9.95	10.05	10.07	10.24	10.44
Kota Batu	7.31	7.64	7.75	8.34	8.41	8.44	8.45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

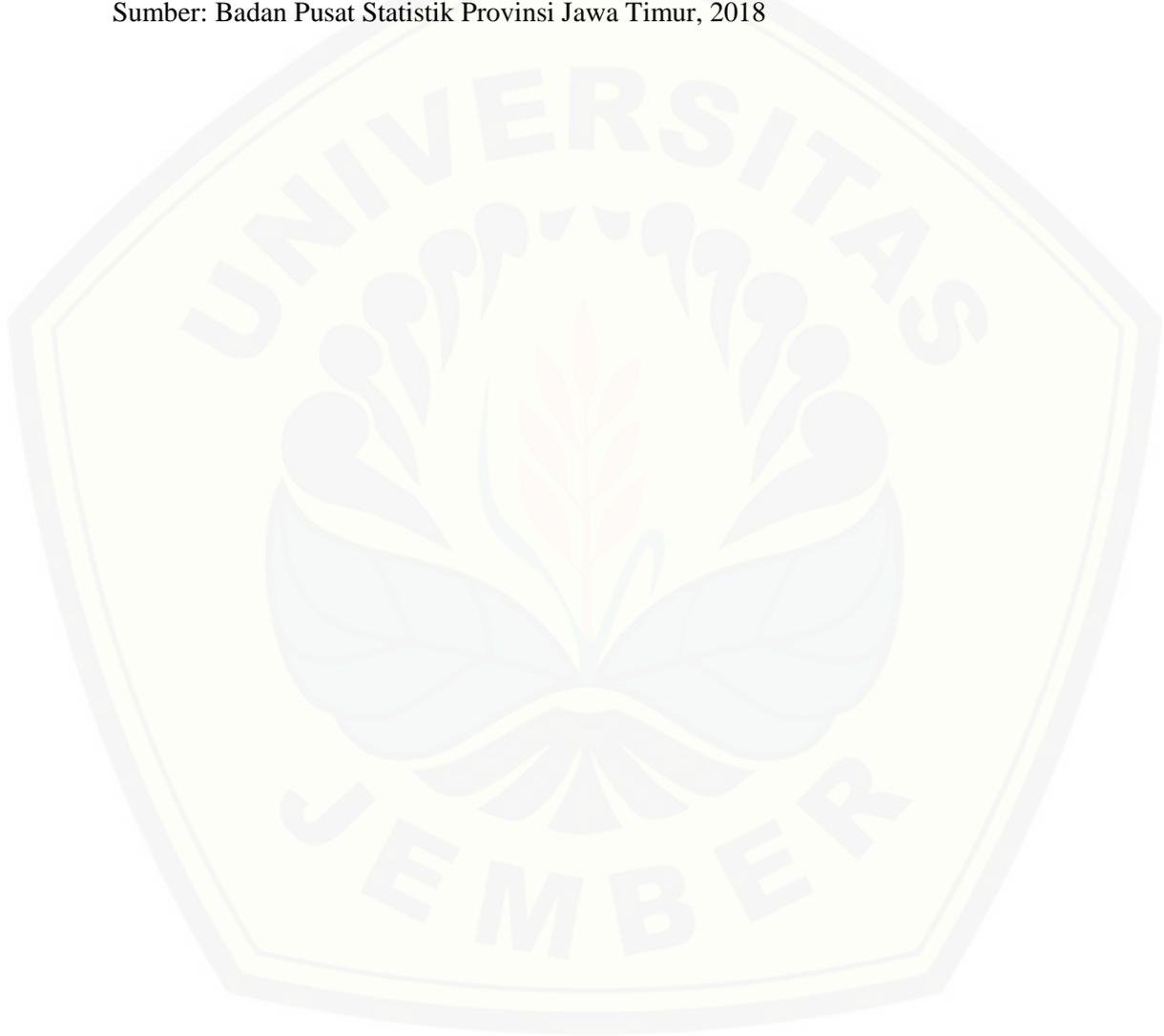


Lampiran 9 Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Ribuan Rupiah)

Wilayah	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Jawa Timur</b>	<b>9002</b>	<b>9396</b>	<b>9797</b>	<b>9978</b>	<b>10012</b>	<b>10383</b>	<b>10715</b>
Kabupaten Pacitan	6775	7232	7496	7626	7656	7686	8048
Kabupaten Ponorogo	7537	7849	8188	8354	8383	8654	8908
Kabupaten Trenggalek	7584	7936	8249	8389	8417	8445	8829
Kabupaten Tulungagung	8660	8929	9256	9477	9505	9534	9881
Kabupaten Blitar	8423	8726	9076	9217	9245	9272	9467
Kabupaten Kediri	8791	9102	9449	9605	9633	9883	10140
Kabupaten Malang	7980	8300	8633	8788	8817	8845	9018
Kabupaten Lumajang	7116	7467	7772	7869	7895	7921	8311
Kabupaten Jember	7380	7732	8069	8198	8227	8255	8409
Kabupaten Banyuwangi	9262	9741	10118	10341	10379	10692	11171
Kabupaten Bondowoso	8064	8418	8856	9138	9176	9519	10007
Kabupaten Situbondo	7442	7812	8174	8351	8383	8677	9106
Kabupaten Probolinggo	9004	9359	9721	9847	9877	9976	10170
Kabupaten Pasuruan	7343	7661	8075	8261	8293	8707	9198
Kabupaten Sidoarjo	11717	12095	12457	12602	12632	12879	13320
Kabupaten Mojokerto	10099	10552	10915	11171	11208	11559	11798
Kabupaten Jombang	8788	9112	9493	9678	9709	9963	10237
Kabupaten Nganjuk	9663	10100	10656	10717	10754	10995	11451
Kabupaten Madiun	9416	9995	10429	10625	10667	10710	10904
Kabupaten Magetan	8961	9635	10375	10484	10539	10594	10988
Kabupaten Ngawi	9003	9388	9905	10105	10143	10584	10810
Kabupaten Bojonegoro	8087	8413	8809	8934	8964	8993	9420
Kabupaten Tuban	7898	8332	8706	8872	8906	8940	9353
Kabupaten Lamongan	8553	8966	9386	9511	9545	9821	10252
Kabupaten Gresik	10491	10926	11360	11480	11514	11548	11961
Kabupaten Bangkalan	6709	7006	7316	7434	7459	7667	8030
Kabupaten Sampang	6952	7337	7692	7769	7798	7827	8096
Kabupaten Pamekasan	6532	6922	7260	7445	7478	7679	7975
Kabupaten Sumenep	5746	6524	6834	7093	7143	7577	7846
Kota Kediri	9765	10098	10432	10670	10702	10733	11070
Kota Blitar	10756	11071	11534	11641	11672	12258	12499
Kota Malang	14754	15015	15287	15378	15399	15420	15732
Kota Probolinggo	8894	9387	9864	10089	10182	10558	10792

Wilayah	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Pasuruan	10237	10705	11184	11484	11527	11963	12295
Kota Mojokerto	10371	10762	11191	11625	11689	12060	12449
Kota Madiun	13455	13799	14317	14604	14643	14723	15300
Kota Surabaya	14473	14777	15104	15488	15492	15991	16295
Kota Batu	9395	9980	10667	10803	10853	11274	11772

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

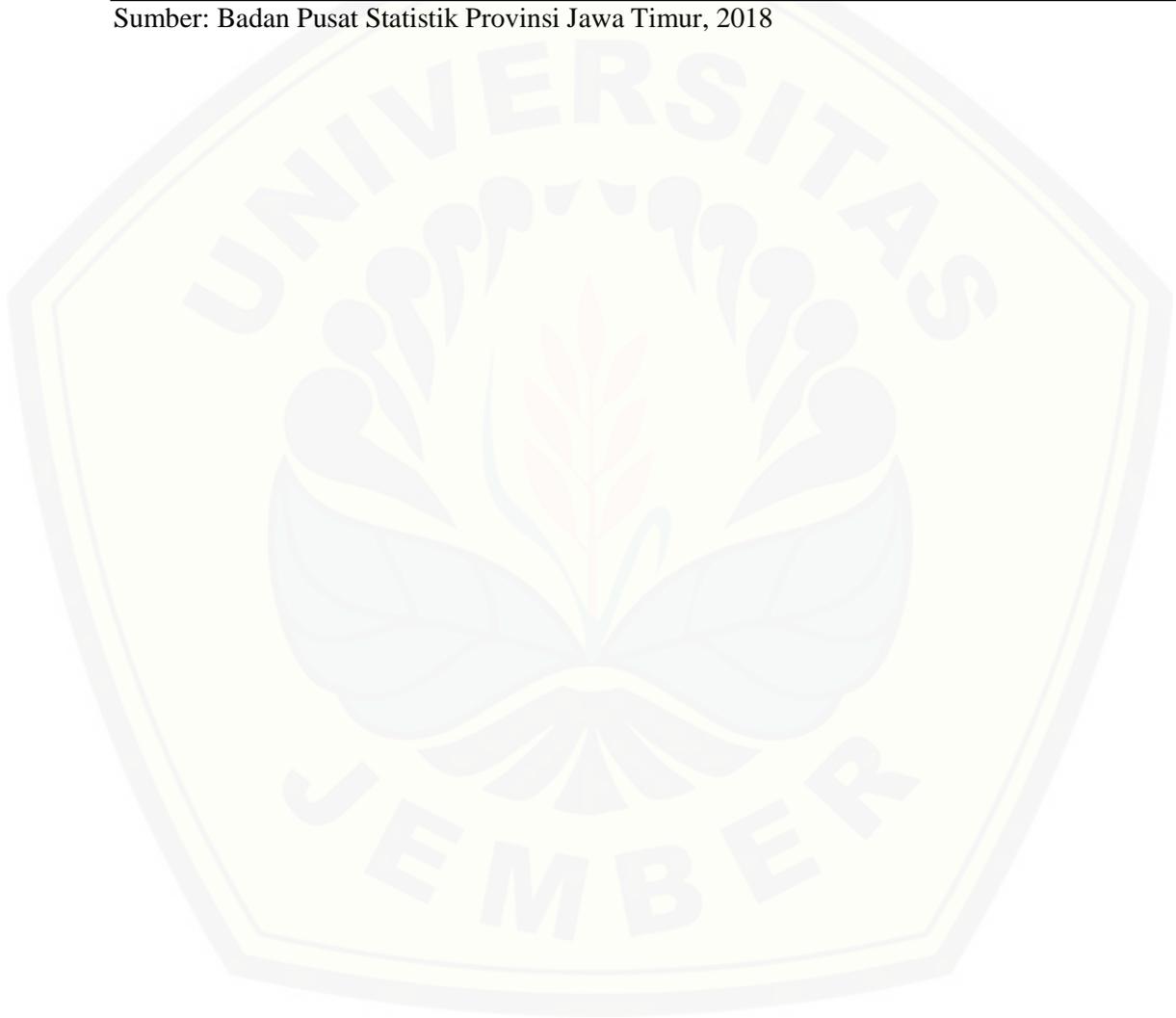


Lampiran 10 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun  
2010-2016

Kabupaten/Kota	Angka Kemiskinan (%)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pacitan	19,50	18,1	17,23	16,6	16,18	16,68	15,49
Ponorogo	13,22	12,30	11,72	11,8	11,53	11,91	11,75
Trenggalek	15,98	14,90	14,16	13,5	13,10	13,39	13,24
Tulungagung	10,64	9,90	9,37	9,0	8,75	8,57	8,23
Blitar	12,14	11,30	10,71	10,5	10,22	9,97	9,88
Kediri	15,52	14,40	13,67	13,17	12,77	12,91	12,72
Malang	12,54	11,70	11,01	11,44	11,07	11,53	11,49
Lumajang	13,98	13,00	12,36	12,09	11,75	11,52	11,22
Jember	13,27	12,40	11,77	11,63	11,28	11,22	10,97
Banyuwangi	11,25	10,50	9,94	9,57	9,29	9,17	8,79
Bondowoso	17,89	16,70	15,76	15,23	14,76	14,96	15,00
Situbondo	16,23	15,10	14,30	13,59	13,15	13,63	13,34
Probolinggo	25,22	23,50	22,15	21,12	20,44	20,82	20,98
Pasuruan	13,18	12,30	11,54	11,22	10,86	10,72	10,57
Sidoarjo	7,45	7,00	6,42	6,69	6,40	6,44	6,39
Mojokerto	12,23	11,40	10,67	10,94	10,56	10,57	10,61
Jombang	13,84	12,90	12,19	11,12	10,80	10,79	10,70
Nganjuk	14,91	13,90	13,17	13,55	13,14	12,69	12,25
Madiun	15,45	14,40	13,66	12,40	12,04	12,54	12,69
Magetan	12,95	12,00	11,46	12,14	11,80	11,35	11,03
Ngawi	18,26	16,70	15,94	15,38	14,88	15,61	15,27
Bojonegoro	18,78	17,50	16,60	15,95	15,48	15,71	14,60
Tuban	20,19	18,80	17,78	17,16	16,64	17,08	17,14
Lamongan	18,70	17,40	16,64	16,12	15,68	15,38	14,89
Gresik	16,42	15,30	14,30	13,89	13,41	13,63	13,19
Bangkalan	28,12	26,20	24,62	23,14	22,38	22,57	21,41
Sampang	32,47	30,20	27,88	26,97	25,80	25,69	24,11
Pamekasan	22,48	20,90	19,54	18,45	17,74	17,41	16,70
Sumenep	24,61	23,10	21,88	21,13	20,49	20,20	20,09
Kota Kediri	9,31	8,60	8,11	8,20	7,95	8,51	8,40
Kota Blitar	7,63	7,10	6,73	7,39	7,15	7,29	7,18
Kota Malang	5,90	5,50	5,19	4,85	4,80	4,60	4,33
Kota Probolinggo	19,03	17,70	18,33	17,35	8,37	8,17	7,97

Kabupaten/Kota	Angka Kemiskinan (%)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Pasuruan	9,00	8,40	7,88	7,57	7,34	7,47	7,62
Kota Mojokerto	7,42	6,90	6,46	6,63	6,42	6,16	5,73
Kota Madiun	6,11	5,70	5,35	5,00	4,86	4,89	5,16
Kota Surabaya	7,07	6,60	6,23	5,97	5,79	5,82	5,63
Kota Batu	5,11	4,70	4,45	4,75	4,59	4,71	4,48
<b>Jawa Timur</b>	<b>14,87</b>	<b>13,80</b>	<b>13,08</b>	<b>12,73</b>	<b>12,28</b>	<b>12,34</b>	<b>12,05</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018



Lampiran 11 Garis Kemiskinan per Kapita per Bulan Kabupaten/Kota di Provinsi  
Jawa Timur Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pacitan	177.300	193.180	203 979	215 482	220 810	228 573	239 339
Kab. Ponorogo	193.047	210.411	224 186	239 963	247 368	251 525	266 312
Kab. Trenggalek	195.444	214.312	228 681	243 665	250 666	260 133	275 426
Kab. Tulungagung	214.362	234.806	251 372	269 290	277 707	292 483	304 518
Kab. Blitar	192.514	210.254	222 899	236 381	244 382	255 966	272 358
Kab. Kediri	200.237	218.865	232 373	245 287	251 547	261 088	272 374
Kab. Malang	197.129	215.605	229 619	245 120	254 380	265 629	282 933
Kab. Lumajang	185.321	202.773	215 326	228 796	234 728	245 806	258 840
Kab. Jember	202.010	226.546	242 440	260 106	267 962	283 510	299 823
Kab. Banyuwangi	220.031	240.315	257 857	276 648	285 004	295 185	311 722
Kab. Bondowoso	229.746	251.426	270 530	290 792	299 819	313 734	331 975
Kab. Situbondo	192.862	211.262	225 582	240 085	246 483	254 656	270 406
Kab. Probolinggo	255.757	280.101	303 447	328 407	340 539	355 051	373 569
Kab. Pasuruan	218.432	238.640	255 822	274 486	283 327	292 281	306 311
Kab. Sidoarjo	248.856	277.776	301 675	329 946	346 538	371 947	394 401
Kab. Mojokerto	220.066	240.502	259 583	280 779	293 609	311 022	330 940
Kab. Jombang	229.976	251.704	270 930	289 841	301 162	316 922	337 217
Kab. Nganjuk	232.275	253.819	273 260	295 806	308 506	322 820	341 653
Kab. Madiun	205.905	224.713	240 798	256 567	265 310	277 092	294 451
Kab. Magetan	203.323	221.951	236 801	253 040	262 069	272 972	288 246
Kab. Ngawi	191.152	208.220	220 560	233 596	240 780	250 008	264 706
Kab. Bojonegoro	211.213	230.397	246 454	263 439	272 886	284 319	295 250
Kab. Tuban	206.635	225.731	241 103	256 900	265 659	277 599	294 543
Kab. Lamongan	221.413	242.441	260 787	279 166	289 403	303 780	321 002
Kab. Gresik	258.503	285.519	306 177	331 296	348 888	372 661	393 447
Kab. Bangkalan	228.235	251.599	270 870	291 529	305 174	319 120	334 338
Kab. Sampang	209.898	229.414	245 299	261 972	272 900	284 928	296 268
Kab. Pamekasan	205.494	225.878	240 737	256 586	266 953	278 093	292 631
Kab. Sumenep	205.556	225.096	241 084	259 046	270 890	284 756	301 781
Kota Kediri	267.936	288.876	316 693	349 925	366 788	386 521	400 096
Kota Blitar	232.945	257.685	279 661	304 224	319 177	338 532	356 147
Kota Malang	274.863	302.103	330 765	362 162	381 400	411 709	426 527
Kota Probolinggo	386.711	425.583	335 874	364 317	383 673	403 037	418 480
Kota Pasuruan	244.435	269.543	292 241	316 862	328 648	343 392	362 224
Kota Mojokerto	244.778	266.978	287 728	312 919	328 250	348 670	364 021
Kota Madiun	241.503	260.179	288 368	320 210	338 609	359 771	376 956
Kota Surabaya	282.586	310.074	339 208	372 511	393 151	418 930	438 283
Kota Batu	252.890	280.330	306 780	336 844	355 317	380 393	398 401

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JAWA TIMUR	218.568	227.602	243 783	273 758	289 945	305 171	321 761

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018



Lampiran 12 Tabel Logaritma Angka Kemiskinan, PDRB, dan IPM  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	Tahun	AKM	PDRB	IPM
Kab. Pacitan	2010	19.50	6817.40	61.14
Kab. Pacitan	2011	18.10	7246.20	62.03
Kab. Pacitan	2012	17.23	7705	62.94
Kab. Pacitan	2013	16.66	8157.60	63.38
Kab. Pacitan	2014	16.18	8582.20	63.81
Kab. Pacitan	2015	16.68	9019.50	64.92
Kab. Pacitan	2016	15.49	9489.10	65.74
Kab. Ponorogo	2010	13.22	8961.50	64.13
Kab. Ponorogo	2011	12.30	9472.20	65.28
Kab. Ponorogo	2012	11.72	10038.40	66.16
Kab. Ponorogo	2013	11.87	10554.50	67.03
Kab. Ponorogo	2014	11.53	11104.50	67.40
Kab. Ponorogo	2015	11.91	11687.90	68.16
Kab. Ponorogo	2016	11.75	12305.70	68.93
Kab. Trenggalek	2010	15.98	7962.10	63.67
Kab. Trenggalek	2011	14.90	8435.20	64.27
Kab. Trenggalek	2012	14.16	8959.50	65.01
Kab. Trenggalek	2013	13.50	9496.70	65.76
Kab. Trenggalek	2014	13.10	9998.50	66.16
Kab. Trenggalek	2015	13.39	10501.60	67.25
Kab. Trenggalek	2016	13.24	11026.50	67.78
Kab. Tulungagung	2010	10.64	16776.30	67.28
Kab. Tulungagung	2011	9.90	17845.20	67.76
Kab. Tulungagung	2012	9.37	18999	68.29
Kab. Tulungagung	2013	9.03	20164.30	69.30
Kab. Tulungagung	2014	8.75	21265.20	69.49
Kab. Tulungagung	2015	8.57	22326.60	70.07
Kab. Tulungagung	2016	8.23	23446.40	70.82
Kab. Blitar	2010	12.14	16213.90	64.79
Kab. Blitar	2011	11.30	17093.90	65.47
Kab. Blitar	2012	10.71	18054.50	66.17
Kab. Blitar	2013	10.53	18967.30	66.49
Kab. Blitar	2014	10.22	19920.20	66.88
Kab. Blitar	2015	9.97	20925.50	68.13
Kab. Blitar	2016	9.88	21991.40	68.88
Kab. Kediri	2010	15.52	18254.50	66.24
Kab. Kediri	2011	14.40	19354.90	66.84

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>AKM</b>	<b>PDRB</b>	<b>IPM</b>
Kab. Kediri	2012	13.67	20538.30	67.29
Kab. Kediri	2013	13.17	21733.50	68.01
Kab. Kediri	2014	12.77	22890	68.44
Kab. Kediri	2015	12.91	24007.70	68.91
Kab. Kediri	2016	12.72	25211.90	69.87
Kab. Malang	2010	12.54	41342.90	63.47
Kab. Malang	2011	11.70	44091.30	63.97
Kab. Malang	2012	11.01	47076	64.71
Kab. Malang	2013	11.44	49571.70	65.20
Kab. Malang	2014	11.07	52550.40	65.59
Kab. Malang	2015	11.53	55317.80	66.63
Kab. Malang	2016	11.49	58247.30	67.51
Kab. Lumajang	2010	13.98	14260.10	59.62
Kab. Lumajang	2011	13.00	15144.40	60.72
Kab. Lumajang	2012	12.36	16053.40	61.31
Kab. Lumajang	2013	12.09	16949.60	61.87
Kab. Lumajang	2014	11.75	17851.90	62.33
Kab. Lumajang	2015	11.52	18676.90	63.02
Kab. Lumajang	2016	11.22	19555.20	63.74
Kab. Jember	2010	13.27	33375.50	59.94
Kab. Jember	2011	12.40	35208.20	60.64
Kab. Jember	2012	11.77	37262	61.31
Kab. Jember	2013	11.63	39519.20	62.43
Kab. Jember	2014	11.28	41971.70	62.64
Kab. Jember	2015	11.22	44222.60	63.04
Kab. Jember	2016	10.97	46526.60	64.01
Kab. Banyuwangi	2010	11.25	32463.80	64.54
Kab. Banyuwangi	2011	10.50	34720.40	65.48
Kab. Banyuwangi	2012	9.94	37235.70	66.12
Kab. Banyuwangi	2013	9.57	39733.60	66.74
Kab. Banyuwangi	2014	9.29	42005.70	67.31
Kab. Banyuwangi	2015	9.17	44529.90	68.08
Kab. Banyuwangi	2016	8.79	46924.60	69
Kab. Bondowoso	2010	17.89	8515.90	59.47
Kab. Bondowoso	2011	16.70	9033	60.46
Kab. Bondowoso	2012	15.76	9583.40	62.24
Kab. Bondowoso	2013	15.23	10140.10	63.21
Kab. Bondowoso	2014	14.76	10652.40	63.43
Kab. Bondowoso	2015	14.96	11179.60	63.95
Kab. Bondowoso	2016	15.00	11735.60	64.52
Kab. Situbondo	2010	16.23	8471.40	60.07

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>AKM</b>	<b>PDRB</b>	<b>IPM</b>
Kab. Situbondo	2011	15.10	8927.10	60.82
Kab. Situbondo	2012	14.30	9411.60	62.23
Kab. Situbondo	2013	13.59	9993.80	63.43
Kab. Situbondo	2014	13.15	10572.40	63.91
Kab. Situbondo	2015	13.63	11086.50	64.53
Kab. Situbondo	2016	13.34	11640.80	65.08
Kab. Probolinggo	2010	25.22	15028.10	59.83
Kab. Probolinggo	2011	23.50	15912.50	60.30
Kab. Probolinggo	2012	22.15	16936.80	61.33
Kab. Probolinggo	2013	21.12	17808.90	62.61
Kab. Probolinggo	2014	20.44	18682.20	63.04
Kab. Probolinggo	2015	20.82	19571	63.83
Kab. Probolinggo	2016	20.98	20504.10	64.12
Kab. Pasuruan	2010	13.18	61178.30	60.79
Kab. Pasuruan	2011	12.30	65271.60	61.43
Kab. Pasuruan	2012	11.54	70167.10	62.31
Kab. Pasuruan	2013	11.22	75044	63.74
Kab. Pasuruan	2014	10.86	80105.40	64.35
Kab. Pasuruan	2015	10.72	84415.70	65.04
Kab. Pasuruan	2016	10.57	89011.20	65.71
Kab. Sidoarjo	2010	7.45	81472.70	73.75
Kab. Sidoarjo	2011	7.00	87212.40	74.48
Kab. Sidoarjo	2012	6.42	93543.90	75.14
Kab. Sidoarjo	2013	6.69	99992.50	76.39
Kab. Sidoarjo	2014	6.40	106434.30	76.78
Kab. Sidoarjo	2015	6.44	112012.90	77.43
Kab. Sidoarjo	2016	6.39	118179.20	78.17
Kab. Mojokerto	2010	12.23	34147.10	68.14
Kab. Mojokerto	2011	11.40	36405.80	68.71
Kab. Mojokerto	2012	10.67	39047.30	69.17
Kab. Mojokerto	2013	10.94	41608.40	69.84
Kab. Mojokerto	2014	10.56	44292	70.22
Kab. Mojokerto	2015	10.57	46792.30	70.85
Kab. Mojokerto	2016	10.61	49321.90	71.38
Kab. Jombang	2010	13.84	17350.80	66.20
Kab. Jombang	2011	12.90	18385	66.84
Kab. Jombang	2012	12.19	19514.80	67.82
Kab. Jombang	2013	11.12	20672.30	68.63
Kab. Jombang	2014	10.80	21793.20	69.07
Kab. Jombang	2015	10.79	22960.20	69.59
Kab. Jombang	2016	10.70	24199.10	70.03

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>AKM</b>	<b>PDRB</b>	<b>IPM</b>
Kab. Nganjuk	2010	14.91	11405.40	65.60
Kab. Nganjuk	2011	13.90	12061.20	66.58
Kab. Nganjuk	2012	13.17	12767	68.07
Kab. Nganjuk	2013	13.55	13456	68.98
Kab. Nganjuk	2014	13.14	14142.90	69.59
Kab. Nganjuk	2015	12.69	14875.40	69.90
Kab. Nganjuk	2016	12.25	15661.80	70.50
Kab. Madiun	2010	15.45	8119.70	64.87
Kab. Madiun	2011	14.40	8608.70	65.98
Kab. Madiun	2012	13.66	9135.70	67.32
Kab. Madiun	2013	12.40	9654.10	68.07
Kab. Madiun	2014	12.04	10169.70	68.60
Kab. Madiun	2015	12.54	10704.90	69.39
Kab. Madiun	2016	12.69	11268.90	69.67
Kab. Magetan	2010	12.95	8277.80	67.58
Kab. Magetan	2011	12.00	8744.80	68.52
Kab. Magetan	2012	11.46	9251.20	69.56
Kab. Magetan	2013	12.14	9792.60	69.86
Kab. Magetan	2014	11.80	10291.70	70.29
Kab. Magetan	2015	11.35	10823.90	71.39
Kab. Magetan	2016	11.03	11398.10	71.94
Kab. Ngawi	2010	18.26	8456.70	64.52
Kab. Ngawi	2011	16.70	8973.30	65.84
Kab. Ngawi	2012	15.94	9568.20	66.72
Kab. Ngawi	2013	15.38	10094	67.25
Kab. Ngawi	2014	14.88	10681	67.78
Kab. Ngawi	2015	15.61	11223.10	68.32
Kab. Ngawi	2016	15.27	11807.60	68.96
Kab. Bojonegoro	2010	18.78	33291.90	62.19
Kab. Bojonegoro	2011	17.50	36751	63.22
Kab. Bojonegoro	2012	16.60	38136.10	64.20
Kab. Bojonegoro	2013	15.95	39039.40	64.85
Kab. Bojonegoro	2014	15.48	39934.80	65.27
Kab. Bojonegoro	2015	15.71	46892.80	66.17
Kab. Bojonegoro	2016	14.60	57187.40	66.73
Kab. Tuban	2010	20.19	28017.90	61.33
Kab. Tuban	2011	18.80	29934.30	62.47
Kab. Tuban	2012	17.78	31816.30	63.36
Kab. Tuban	2013	17.16	33678.80	64.14
Kab. Tuban	2014	16.64	35519.90	64.58
Kab. Tuban	2015	17.08	37256	65.52

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>AKM</b>	<b>PDRB</b>	<b>IPM</b>
Kab. Tuban	2016	17.14	39081.80	66.19
Kab. Lamongan	2010	18.70	16275.20	65.40
Kab. Lamongan	2011	17.40	17360.50	66.21
Kab. Lamongan	2012	16.64	18562.70	67.51
Kab. Lamongan	2013	16.12	19848.80	68.90
Kab. Lamongan	2014	15.68	21099.90	69.42
Kab. Lamongan	2015	15.38	22316.90	69.84
Kab. Lamongan	2016	14.89	23623.80	70.34
Kab. Gresik	2010	16.42	59068.60	69.90
Kab. Gresik	2011	15.30	62898.70	71.11
Kab. Gresik	2012	14.30	67248.80	72.12
Kab. Gresik	2013	13.89	71314.20	72.47
Kab. Gresik	2014	13.41	76336	72.84
Kab. Gresik	2015	13.63	81360.40	73.57
Kab. Gresik	2016	13.19	85835.10	74.46
Kab. Bangkalan	2010	28.12	15881.40	57.23
Kab. Bangkalan	2011	26.20	16406.50	58.63
Kab. Bangkalan	2012	24.62	16173.70	59.65
Kab. Bangkalan	2013	23.14	16204	60.19
Kab. Bangkalan	2014	22.38	17369.20	60.71
Kab. Bangkalan	2015	22.57	16906.80	61.49
Kab. Bangkalan	2016	21.41	17018.60	62.06
Kab. Sampang	2010	32.47	10064	54.49
Kab. Sampang	2011	30.20	10315.30	55.17
Kab. Sampang	2012	27.88	10910.90	55.78
Kab. Sampang	2013	26.97	11623.80	56.45
Kab. Sampang	2014	25.80	11632.90	56.98
Kab. Sampang	2015	25.69	11874.50	58.18
Kab. Sampang	2016	24.11	12606.80	59.09
Kab. Pamekasan	2010	22.48	6994.20	59.37
Kab. Pamekasan	2011	20.90	7429.40	60.42
Kab. Pamekasan	2012	19.54	7894	61.21
Kab. Pamekasan	2013	18.45	8375.20	62.27
Kab. Pamekasan	2014	17.74	8846.20	62.66
Kab. Pamekasan	2015	17.41	9316.90	63.10
Kab. Pamekasan	2016	16.70	9815.80	63.98
Kab. Sumenep	2010	24.61	15136.50	57.27
Kab. Sumenep	2011	23.10	16064.80	58.70
Kab. Sumenep	2012	21.88	17665	60.08
Kab. Sumenep	2013	21.13	20218.10	60.84
Kab. Sumenep	2014	20.49	21476.90	61.43

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>AKM</b>	<b>PDRB</b>	<b>IPM</b>
Kab. Sumenep	2015	20.20	21750.60	62.38
Kab. Sumenep	2016	20.09	22311.70	63.42
Kota Kediri	2010	9.31	57550.60	72.20
Kota Kediri	2011	8.60	60020.10	72.93
Kota Kediri	2012	8.11	63185.10	73.66
Kota Kediri	2013	8.20	65408.80	74.18
Kota Kediri	2014	7.95	69232.90	74.62
Kota Kediri	2015	8.51	72945.50	75.67
Kota Kediri	2016	8.40	76959.40	76.33
Kota Blitar	2010	7.63	2855	72.56
Kota Blitar	2011	7.10	3038.40	73.08
Kota Blitar	2012	6.73	3236.60	73.53
Kota Blitar	2013	7.39	3446.80	74.53
Kota Blitar	2014	7.15	3649.60	75.26
Kota Blitar	2015	7.29	3856.90	76
Kota Blitar	2016	7.18	4079.30	76.71
Kota Malang	2010	5.90	31377.30	76.69
Kota Malang	2011	5.50	33273.70	77.36
Kota Malang	2012	5.19	35355.70	78.04
Kota Malang	2013	4.85	37547.70	78.44
Kota Malang	2014	4.80	39724.70	78.96
Kota Malang	2015	4.60	41952.10	80.05
Kota Malang	2016	4.33	44303.90	80.46
Kota Probolinggo	2010	19.03	4921.30	67.30
Kota Probolinggo	2011	17.70	5213.90	68.14
Kota Probolinggo	2012	18.33	5552.10	68.93
Kota Probolinggo	2013	17.35	5911.30	70.05
Kota Probolinggo	2014	8.37	6261.90	70.49
Kota Probolinggo	2015	8.17	6628.80	71.01
Kota Probolinggo	2016	7.97	7018.30	71.50
Kota Pasuruan	2010	9.00	3585.40	69.69
Kota Pasuruan	2011	8.40	3810.70	70.41
Kota Pasuruan	2012	7.88	4051.20	72.01
Kota Pasuruan	2013	7.57	4315.10	72.89
Kota Pasuruan	2014	7.34	4561.30	73.23
Kota Pasuruan	2015	7.47	4813.30	73.78
Kota Pasuruan	2016	7.62	5076.40	74.11
Kota Mojokerto	2010	7.42	2987.20	72.78
Kota Mojokerto	2011	6.90	3165.60	73.47
Kota Mojokerto	2012	6.46	3358.40	74.20
Kota Mojokerto	2013	6.63	3566.70	74.91

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>AKM</b>	<b>PDRB</b>	<b>IPM</b>
Kota Mojokerto	2014	6.42	3774.60	75.04
Kota Mojokerto	2015	6.16	3991.40	75.54
Kota Mojokerto	2016	5.73	4221.50	76.38
Kota Madiun	2010	6.11	6081.20	75.98
Kota Madiun	2011	5.70	6494.40	76.48
Kota Madiun	2012	5.35	6937.70	77.21
Kota Madiun	2013	5.00	7470.70	78.41
Kota Madiun	2014	4.86	7965.30	78.81
Kota Madiun	2015	4.89	8455.40	79.48
Kota Madiun	2016	5.16	8954.70	80.01
Kota Surabaya	2010	7.07	231204.70	77.20
Kota Surabaya	2011	6.60	247686.60	77.62
Kota Surabaya	2012	6.23	265892.10	78.05
Kota Surabaya	2013	5.97	286050.70	78.51
Kota Surabaya	2014	5.79	305947.60	78.87
Kota Surabaya	2015	5.82	324215.20	79.47
Kota Surabaya	2016	5.63	343652.60	80.38
Kota Batu	2010	5.11	6504.40	68.66
Kota Batu	2011	4.70	6968	69.76
Kota Batu	2012	4.45	7473.60	70.62
Kota Batu	2013	4.75	8018.60	71.55
Kota Batu	2014	4.59	8572.10	71.89
Kota Batu	2015	4.71	9145.90	72.62
Kota Batu	2016	4.48	9750.90	73.57

Lampiran 13 Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	74.663960	(37,226)	0.0000
Cross-section Chi-square	686.815756	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: AKM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/18 Time: 01:34

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.45727	0.740257	28.98624	0.0000
PDRB	0.014129	0.015173	0.931205	0.3526
IPM	-4.541169	0.177768	-25.54544	0.0000
R-squared	0.715771	Mean dependent var	2.468677	
Adjusted R-squared	0.713609	S.D. dependent var	0.440904	
S.E. of regression	0.235952	Akaike info criterion	-0.039161	
Sum squared resid	14.64211	Schwarz criterion	0.001254	
Log likelihood	8.208408	Hannan-Quinn criter.	-0.022925	
F-statistic	331.1544	Durbin-Watson stat	0.068598	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 14 Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.398580	2	0.0012

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	-0.251899	0.010756	0.012122	0.0170
IPM	-1.868236	-3.376194	0.306746	0.0065

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: AKM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/18 Time: 01:37

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.80940	1.513667	8.462500	0.0000
PDRB	-0.251899	0.115990	-2.171741	0.0309
IPM	-1.868236	0.604615	-3.089961	0.0023

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.978506	Mean dependent var	2.468677
Adjusted R-squared	0.974797	S.D. dependent var	0.440904
S.E. of regression	0.069996	Akaike info criterion	-2.342980
Sum squared resid	1.107259	Schwarz criterion	-1.804108
Log likelihood	351.6163	Hannan-Quinn criter.	-2.126494
F-statistic	263.8109	Durbin-Watson stat	0.792498
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Lampiran 15 Hasil Uji Multikolinieritas

	PDRB	IPM
PDRB	1.000000	0.157103
IPM	0.157103	1.000000

## Lampiran 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/24/18 Time: 05:17  
 Sample: 2010 2016  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.238920	0.444734	-0.537219	0.5916
PDRB	0.030256	0.034079	0.887805	0.3756
IPM	-0.005205	0.177643	-0.029303	0.9766

## Effects Specification

## Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.874515	Mean dependent var	0.036042
Adjusted R-squared	0.852860	S.D. dependent var	0.053614
S.E. of regression	0.020566	Akaike info criterion	-4.792606
Sum squared resid	0.095585	Schwarz criterion	-4.253734
Log likelihood	677.4166	Hannan-Quinn criter.	-4.576120
F-statistic	40.38486	Durbin-Watson stat	1.660669
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 17 Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: AKM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/18/18 Time: 01:43  
 Sample: 2010 2016  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.80940	1.513667	8.462500	0.0000
PDRB	-0.251899	0.115990	-2.171741	0.0309
IPM	-1.868236	0.604615	-3.089961	0.0023

## Effects Specification

## Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.978506	Mean dependent var	2.468677
Adjusted R-squared	0.974797	S.D. dependent var	0.440904
S.E. of regression	0.069996	Akaike info criterion	-2.342980
Sum squared resid	1.107259	Schwarz criterion	-1.804108
Log likelihood	351.6163	Hannan-Quinn criter.	-2.126494
F-statistic	263.8109	Durbin-Watson stat	0.792498
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Fixed Effect (Cross)*

Pacitan	0.047573
Ponorogo	-0.141511
Trenggalek	-0.046402
Tulungagung	-0.187548
Blitar	-0.116489
Kediri	0.192971
Malang	0.165064
Lumajang	-0.149061
Jember	0.032110
Banyuwangi	-0.018221
Bondowoso	-0.008841
Situbondo	-0.104634
Probolinggo	0.458647
Pasuruan	0.204129



Sidoarjo	0.077539
Mojokerto	0.195040
Jombang	0.043948
Nganjuk	0.071065
Madiun	-0.040154
Magetan	-0.093913
Ngawi	0.139329
Bojonegoro	0.447329
Tuban	0.460732
Lamongan	0.365154
Gresik	0.662518
Bangkalan	0.462682
Sampang	0.392648
Pamekasan	0.111419
Sumenep	0.411424
Kota Kediri	0.164882
Kota Blitar	-0.730366
Kota Malang	-0.394920
Kota Probolinggo	-0.141174
Kota Pasuruan	-0.641308
Kota Mojokerto	-0.819662
Kota Madiun	-0.760523
Kota Surabaya	0.321621
Kota Batu	-1.033098

## Lampiran 18 Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada salah satu pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan kendangsari Industri No. 33-34 Surabaya. Adapun data narasumber adalah sebagai berikut:

Nama : Mochamad Sonhaji, B.Sc., M.Sc.

Umur (tahun) : 45

Jabatan : Kasi ASLS BPS Provinsi Jawa Timur

Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti : Bagaimana peran PDRB dan IPM untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur?

Narasumber : Memang secara teori PDRB dan IPM ini *kan* dapat menurunkan angka kemiskinan pada suatu wilayah. Menganut teori dari Amartya Sen, beliau mengatakan bahwa jika suatu wilayah yang berkembang atau yang mengalami peningkatan hanyalah pada bangunan, maksudnya hanya di bagian infrastrukturnya saja, sedangkan IPMnya rendah, maka itu kurang Mbak. Maka, antara pembangunan baik di bagian keuangan dan kualitas manusianya harus berjalan beriringan. Apabila nilai PDRBnya di suatu wilayah itu tinggi, maka wilayah tersebut dikatakan maju dan angka kemiskinannya rendah. Orang-orang yang memproduksi barang di daerah tersebut berarti memperoleh pendapatan dari produksinya, iya *kan*? Nah dari situlah, pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka terbebas dari kemiskinan. Begitu Mbak. Kemudian, untuk nilai IPM ini juga memengaruhi kemiskinan di suatu daerah. IPM ini apa? Nah IPM ini merupakan pengukuran kualitas manusia, bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat. Bisa saja suatu daerah perekonomiannya tinggi, tapi IPMnya rendah, misalnya jumlah puskesmas di daerah situ

sedikit, jaraknya jauh, lalu pengobatannya membutuhkan biaya mahal itu juga tidak baik. Jadi, IPM harus tinggi agar menciptakan pembangunan yang sesungguhnya. Antara IPM dan PDRB harus beriringan agar kemiskinan di suatu wilayah dapat diturunkan. Sama juga dengan Provinsi Jawa Timur, yang saya paparkan tadi juga berlaku.

Peneliti : Bagaimana konsep perhitungan PDRB untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

Narasumber : PDRB ini singkatannya dari produk domestik regional bruto. Barang ataupun jasa semuanya yang dihasilkan pada suatu wilayah pada tahun tertentu. Bisa dilihat di web Mbak untuk lebih *detailnya*. PDRB ini merupakan selisih nilai *output* dengan nilai awal dalam produksi. Bisa juga disebut nilai antara. Misalnya, saya memproduksi makanan, biaya awal saya memproduksi adalah 20 ribu, lalu setelah jadi uang yang saya peroleh 50 ribu. Nah, selisih antara 50 ribu dengan 20 ribu inilah yang disebut nilai antara. Jadi PDRB merupakan nilai tambahnya suatu barang atau jasa itu sendiri.

Peneliti : Pendekatan apa saja yang digunakan dalam perhitungan PDRB di Provinsi Jawa Timur?

Narasumber : Perhitungan untuk semua data BPS itu sama, Mbak. Entah itu yang per kabupaten, per provinsi, atau data Indonesia sekali pun, perhitungannya sama. Ada tiga pendekatan yaitu: lapangan usaha atau produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Nanti semua pendekatan ini menghasilkan angka yang sama. Kalau pendekatan produksi ini didasarkan jumlah dari sektor lapangan usaha. Ada 17 sektor, rincinya nanti lihat di buku yang disediakan di Perpustakaan BPS Jatim ya Mbak.

Peneliti : Mengapa perhitungan PDRB didasarkan pada tahun 2010?

Narasumber : Perhitungan PDRB ada dua Mbak, harga berlaku (*current price*) dan harga konstan (*constant price*). Kalau harga berlaku

itu tujuannya melihat berapa besar PDRB tahun tertentu saja, sedangkan yang konstan itu melihat pertumbuhannya. Jadi begini, ibarat air dalam suatu tempat menggenang dan airnya banyak, tapi tidak berjalan. Nah itu *kan* stagnan ya Mbak. Air yang baik yang bagaimana? Tentunya yang alirannya deras *toh*. Percuma air banyak tapi menggenang, yang diperlukan adalah aliran banyak dan deras. Sama halnya dengan PDRB ini. Nilainya tinggi, tapi tidak berjalan deras, sama saja itu kurang baik bagi perekonomian. Makanya, untuk menstandarkan harus ada acuan tahun dasar, makanya tahun dasar ini ditentukan setiap 10 tahun sekali. Tahun 2000 dan 2010. Untuk yang sekarang mengacu pada tahun 2010. Untuk apa ada tahun dasar? Gunanya untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Saya gambarkan begini lagi Mbak. Misalnya tahun kemarin saya memproduksi 1.000 roti dengan harga 5.000 maka pendapatannya semua 5.000.000. Tahun ini saya produksi dengan jumlah yang sama yaitu 1.000 roti dengan harga 5.100 totalnya semua 5.100.000. nilai antara 5.000.000 dan 5.100.000 itu sama Mbak. Berarti saya tidak mengalami perubahan *kan*? *Toh Tohyang* diproduksi jumlahnya sama. Makanya dijadikanlah acuan tahun dasar untuk mengetahui pertumbuhan tersebut.

Peneliti : Bagaimana menentukan tolak ukur perhitungan IPM?

Narasumber : Perhitungannya ditentukan dengan mengacu pada tahun 2012 setelah ada perubahan kombinasi IPM. Ada tiga kategori, atau istilahnya di BPS itu adalah indeks, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keuangan (pengeluaran per kapita). Kalau pendidikan ini berasal dari dua perhitungan, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Rata-rata lama sekolah ini jumlah rata-rata di suatu daerah yang ditempuh oleh masyarakat untuk pendidikan formal, mulai dari SD. Angka

harapan sekolah ini pendidikan yang nantinya dapat dirasakan oleh penduduk, batasannya sampai pada usia 25 tahun. Misal begini, Mbak sudah S1 di umur ke 21. Namun, Mbak berhenti selama setahun, itu Mbak tidak bisa divonis pendidikan terakhirnya adalah S1, karena masih ada sisa waktu selama empat tahun, dan kemungkinan dapat melanjutkan S2. Jadi, batasannya sampai usia 25 tahun. Kalau dari sisi kesehatan, ini dilihat dari usia penduduk di suatu daerah tersebut. Jika angkanya tinggi atau besar, maksudnya di wilayah tersebut penduduknya dapat bertahan hidup pada usia yang tergolong tinggi, misal 70 atau 80 tahun. Maka, wilayah tersebut IPMnya akan tinggi. Selanjutnya dari sisi pengeluaran masyarakat. Nah itu untuk saat ini kita bandingkan dengan di Jakarta. Misalnya di Surabaya harga bakso satu mangkok 15.000 tapi uang *segitu* di Jakarta tidak dapat membeli bakso yang harganya 25.000. Jadi pengukurannya mengacu pada Jakarta. Dari ketiga komponen tersebut, selanjutnya ditotal dan dikalikan 100.

Peneliti : Bagaimana menentukan standar perhitungan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

Narasumber : Perhitungannya sama semuanya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Sama, entah kabupaten, provinsi, atau pun data Indonesia (nasional). Yang memberikan gelar penduduk termasuk kategori miskin atau tidak, itu hanya BPS Mbak. Batasannya apa? BPS memiliki standar sendiri, yaitu melalui garis kemiskinan. Jadi, seseorang dikategorikan miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. Apabila berada di atas, maka terbebas dari kemiskinan, walaupun kelebihan hanya 1 rupiah saja. Garis kemiskinan ini diukur dari garis makanan dan non makanan. Kemudian angka kemiskinan itu sendiri, hasil dari perbandingan antara jumlah penduduk yang tergolong miskin dengan jumlah penduduk total di suatu

wilayah.

Peneliti : Berapa sumbangsih kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB terbesar terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

Narasumber : Penyumbang terbesar ialah Kota Surabaya, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pabrik yang beroperasi di sini. Kemudian Kota Kediri, di sana *kan* ada pabrik Gudang Garam, pabrik yang menyumbang PDRB terbesar. Intinya yang menyumbang PDRB yang banyak ialah daerah perkotaan, seperti Sidoarjo. Penyumbang terbesar kedua yaitu wilayah kabupaten/kota yang wilayahnya luas dengan pertanian, misalnya Jember, Banyuwangi, dan lainnya. Kabupaten/kota dengan nilai PDRB yang besar ini, angka kemiskinannya kecil Mbak.

Peneliti : Berapa sumbangsih kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM tertinggi terhadap penurunan angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur?

Narasumber : Sama, daerah perkotaan. Kota Surabaya tinggi nilai IPMnya, karena di sini sekolah-sekolah banyak, jadi pendidikan bisa merata. Kemudian dari segi kesehatan, banyak tenaga medis dan tempat kesehatan yang beroperasi di sini. Sementara pengeluaran per kapita di sini tergolong tinggi juga, karena pendapatan masyarakatnya tinggi, maka pemenuhan kebutuhannya juga tinggi di sini Mbak. Kalau kabupaten/kota yang IPMnya tinggi itu ada Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, urutannya nanti bisa dilihat di data BPS. Saya tidak hapal.

Peneliti : Bagaimana kondisi kabupaten/kota dengan nilai PDRB dan IPM terbesar di provinsi Jawa Timur?

Narasumber : Apabila nilai PDRB dan IPM tinggi, tentu angka kemiskinannya rendah itu ya, Mbak. Jangankan jika keduanya tinggi, salah satunya yang tinggi itu juga memengaruhi pada

penurunan angka kemiskinan, apalagi jika keduanya berjalan beriringan, maka penduduknya sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Istilahnya angka kemiskinan akan menurun.



Lampiran 19 Tabel Nilai Distribusi t

<b>df</b>	<b><math>\alpha=0,1</math></b>	<b><math>\alpha=0,05</math></b>
246	1.285002	1.651071
247	1.284988	1.651046
248	1.284975	1.651021
249	1.284961	1.650996
250	1.284947	1.650971
251	1.284933	1.650947
252	1.284920	1.650923
253	1.284907	1.650899
254	1.284893	1.650875
255	1.284880	1.650851
256	1.284867	1.650828
257	1.284854	1.650804
258	1.284841	1.650781
259	1.284829	1.650758
260	1.284816	1.650735
261	1.284804	1.650713
262	1.284791	1.650690
<b>263</b>	<b>1.284779</b>	<b>1.650668</b>
264	1.284767	1.650646
265	1.284754	1.650624
266	1.284742	1.650602
267	1.284730	1.650581
268	1.284718	1.650559
269	1.284707	1.650538
270	1.284695	1.650517
271	1.284683	1.650496

Sumber: Kurniawan, 2008

## Lampiran 20 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162  
Telp./Fax (0331) 334988 Jember 68121

---

**LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI**

Nama : Shofiyah  
 NIM/Angkatan : 140210301082/2014  
 Jurusan/Prog. Studi : Pendidikan IPS/Pendidikan Ekonomi  
 Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016  
 Pembimbing I : Dr. Sukidin, M.Pd.

**KEGIATAN KONSULTASI**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TT. Pembimbing I
1.	Senin, 14 Mei 2018	Judul	
2.	Jumat, 18 Mei 2018	Bab 1 dan 2	
3.	Selasa, 22 Mei 2018	Revisi Bab 1 dan 2	
4.	Kamis, 31 Mei 2018	Bab 1, 2, dan 3	
5.	Selasa, 5 Juni 2018	Revisi bab 3	
6.	Rabu, 6 Juni 2018	Lampiran	
7.	Jumat, 8 Juni 2018	ACC Seminar Proposal	Acc 1/8 8/6
8.	Senin, 23 Juli 2018	Revisi seminar proposal	
9.	Selasa, 24 Juli 2018	Bab 4	
10.	Kamis, 26 Juli 2018	Bab 4 dan 5	
11.	Selasa, 31 Juli 2018	Revisi Bab 4 dan 5	
12.	Rabu, 01 Agustus 2018	ACC Sidang Skripsi	Acc 2 Ayl
13.			
14.			
15.			

Catatan:

- Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
- Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi

## Lampiran 21 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 2



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162  
Telp./Fax (0331) 334988, Jember 68121

---

**LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI**

Nama : Shofiyah  
NIM/Angkatan : 140210301082/2014  
Jurusan/Prog. Studi : Pendidikan IPS/Pendidikan Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016  
Pembimbing II : Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd.

**KEGIATAN KONSULTASI**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TT. Pembimbing II
1.	Senin, 14 Mei 2018	Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Jumat, 18 Mei 2018	Bab 1 dan 2	<i>[Signature]</i>
3.	Senin, 21 Mei 2018	Bab 1, 2, dan 3	<i>[Signature]</i>
4.	Senin, 28 Mei 2018	Revisi Bab 1, 2, dan 3	<i>[Signature]</i>
5.	Senin, 4 Juni 2018	Revisi Bab 1, 2, dan 3	<i>[Signature]</i>
6.	Rabu, 6 Juni 2018	Lampiran	<i>[Signature]</i>
7.	Jumat, 22 Juni 2018	ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
8.	Selasa, 17 Juli 2018	Revisi Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
9.	Rabu, 18 Juli 2018	Bimbingan Bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
10.	Senin, 23 Juli 2018	Revisi Bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
11.	Senin, 30 Juli 2018	Revisi Bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
12.	Selasa, 31 Juli 2018	Lampiran	<i>[Signature]</i>
13.	Rabu, 01 Agustus 2018	ACC Sidang Skripsi	<i>[Signature]</i>
14.			
15.			

Catatan:

- Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
- Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi

## Lampiran 22 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121  
Telepon: 0331- 334988, 330738 Faks: 0331-332475  
Laman: [www.fkip.unej.ac.id](http://www.fkip.unej.ac.id)

---

Nomor **4:989**/UN25.1.5/LT/2018  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 3 JUL 2018

Yth. Kepala BPS Provinsi Jatim  
di Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43-44 Surabaya 60292

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini:

Nama	: Shofiyah
NIM	: 140210301082
Program Studi	: Pendidikan Ekonomi
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan wawancara kepada pihak BPS Provinsi Jatim sebagai penyempurnaan penelitian yang sedang dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin, sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenaan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

  
Prof. Dr. Suraino, M.Si.  
NIP. 196706251992031003

## Lampiran 23 Surat Keterangan Penelitian

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
No:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Sonhaji, B.Sc., M.Sc.  
Jabatan : Kasi ASLS BPS Provinsi Jawa Timur  
Tempat : BPS Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jalan Raya Kendangsari No. 33-34 Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Shofiyah  
NIM : 140210301082  
Jurusan/Prodi : Pendidikan IPS/Pendidikan Ekonomi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas : Universitas Jember

Adalah benar telah melakukan wawancara sebagai kelengkapan penelitian di BPS Provinsi Jawa pada hari Senin, 16 Juli 2018 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakannya sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juli 2018  
Kasi ASLS BPS Provinsi Jawa Timur

  
**Mochamad Sonhaji, B.Sc., M.Sc.**  
NIP. 19730627 199112 1 001

## Lampiran 24 Daftar Riwayat Hidup

Nama : Shofiyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
    Ayah : Sudarmo  
    Ibu : Rustija  
Alamat : Dusun Rabesen RT/RW 16/05 Desa Besuk Kidul,  
Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo  
E-mail : [140210301082@students.unej.ac.id](mailto:140210301082@students.unej.ac.id)  
Pendidikan :

No	Sekolah	Tempat	Tahun
1	SD Negeri Besuk Kidul	Probolinggo	2002-2008
2	SMP Negeri 1 Besuk	Probolinggo	2008-2011
3	SMA Negeri 1 Kraksaan	Probolinggo	2011-2014